

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAN KOTA DI KAWASAN SWP GERBANGKERTASUSILA PLUS
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012-2017
PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

TESIS

**OLEH:
MUHAJIRIN
NIM : 16801012**



MAGISTER EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

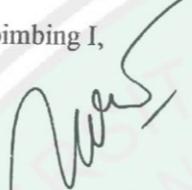
2019/1440H

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis dengan judul “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

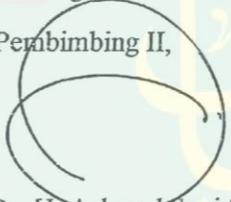
Malang, 17 Oktober 2018

Pembimbing I,


Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M.
NIP. 19740918 200312 2 004

Malang, 17 Oktober 2018

Pembimbing II,


Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.
NIP. 19720212 200312 1 003

Malang, 17 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ekonomi Syariah


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A
NIP. 197307192005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Sockarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Proposal Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah disetujui oleh Dewan Penguji untuk dilanjutkan ke proses Pembimbingan Tesis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Nama : Muhajirin

NIM : 16801012

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Proposal : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dewan Penguji :

NO	Nama	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.	07-12-18	
2.	Dr. Indah Yuliana, M.M.	09-12-2018	
3.	Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, M.Si.	4-12-2018	
4.	H. Eko Suprayitno, M.Si., Ph.D.	03-12-2018	

Mengetahui :
Ketua Program Studi

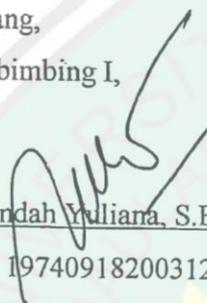
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A
NIP.197307192005011003

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Kawasan Swp Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,
Pembimbing I,


Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M.
NIP. 197409182003122004

Malang,
Pembimbing II,


Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si
NIP. 197202122003121003

Malang,
Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP. 197307192005011003

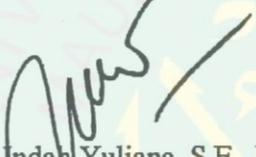
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Kawasan Swp Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” ini telah diuji didepan sidang dewan penguji pada tanggal 3 Januari 2019.

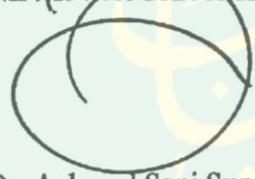
Dewan Penguji,


Dr. Siswanto, M.Si
NIP. 19750906 200604 1 001

Ketua


Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M.
NIP. 197409182003122004

Penguji


Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si.
NIP. 197202122003121003

Sekretaris




Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP: 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajirin
NIM : 16801012
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
Di Kawasan Swp Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2012-2017 Pengaruhnya Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Batu, 02 Januari 2019

Hormat Saya,



Muhajirin

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini kepada kedua orang tuaku Bapak Suparmo dan Ibu Sarinem yang selalu mendukung dan mendoakan saya yang tidak pernah lelah mengingatkan dan memberikan motivasi kepada saya hingga terselesaikannya Tesis Ini beliau berdualah yang sangat berperan penting dalam pengerjaan karya ilmiah ini.

Kepada teman-teman seperjuangan almamater prodi Ekonomi Syariah kelas A yang telah memberikan masukan dan motivasi hingga selesainya tesis ini.

Kepada rekan-rekan HIMMPAS yang selalu mendoakan langkah-langkah ini.

Kepada semua teman yang senantiasa mendoakan dalam kesunyian.

MOTTO

*“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”*

(QS.Muhammad:7)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas rizki, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat *radhiyallahu 'anhum*.

Terimakasih tak terhingga kepada segenap dosen atas tetesan mutiara-mutiara kebijaksanaan dan bimbingannya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Kepada kedua orang tua, atas segala dukungan, doa dan kasih sayangnya, penulis ucapkan *allohummaghfirli waliwaalidayya war hamhumaa kama robbayaanii shaghiira*.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan dari lubuk hati yang terdalam penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselesainya karya tesis dengan judul “Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqhasid Syariah* di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Maalang” ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M. PdI, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA, selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, terima kasih atas motivasi dan kemudahan selama menjalani studi.
4. Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, kritikan, masukan, dan koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis.
5. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, kritikan, masukan, dan koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis.
6. Seluruh dosen Program Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu serta pengalamannya kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi serta penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, yang tanpa kenal lelah dan selalu sabar dalam memberikan bantuan secara moril serta materil hingga tercapainya tahap akhir penulisan ini.
9. Untuk kawan-kawan perkuliahan satu angkatan Magister aekonomi Syariah 2017 baik kelas A dan B. Terkhusus kelas A yang telah menjadi keluarga penulis selama masa perkuliahan ini.

10. Kepada seluruh pihak yang belum disebutkan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, semoga amal kita semua diterima oleh Allah SWT.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan ke depannya. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Batu, 02 Januari 2019

Penulis,

Muhajirin

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah

atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



Abstrak

Muhajirin, 16801012, 2018, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Kawasan Swp Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Tesis, program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing (I) Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M., Pembimbing (II) Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah daerah kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penelitian ini bertujuan Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, mengetahui kemampuan keuangan daerah dan melihat Pengaruh Rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisisensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan selain menggunakan alat analisis rasio keuangan juga melakukan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth* yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran, dan untuk mengetahui pengaruh dari kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan regresi panel.

Tingkat kemandirian mayoritas masih bergantung oleh dana dari pemerintah pusat. Rasio desentralisasi fiskal terlihat bahwa masih belum maksimal. Rasio efektivitas sudah menunjukkan trend positif. Rasio efisiensi menunjukkan pengeluaran untuk belanja sudah optimal. Dari hasil analisis kemampuan keuangan daerah diperoleh rata-rata *share* dan *growth* nilai ≥ 1 maka dikatakan *tinggi*. Kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berada pada posisi Kuadran I. Kinerja keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh tidak positif dan tidak signifikan. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan. Efektivitas keuangan daerah memiliki hubungan positif dan signifikan. Efisiensi memiliki hubungan tidak positif namun signifikan.

Abstract

Muhajirin, 16801012, 2018, Financial Performance of Regency and City Governments in the Swiss Region of Gerbangkertasusila Plus East Java Province 2012-2017 Budget Year Against Community Welfare, Thesis, Sharia Economic Program Postgraduate Malang State Islamic University, Advisor (I) Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M., Advisor (II) Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si.

Keywords: Financial Performance, Community Welfare

The district and city government of SWP, Gerbangkertasusila Plus, East Java province are obliged to improve the welfare of the community. This study aims to measure the financial performance of local governments, find out the financial capabilities of the region and see the effect of regional independence ratio, fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio, and regional financial efficiency ratio on the welfare of SWP Regency and City Gerbangkertasusila Plus East Java Province 2012-2017. In this study the analytical tool used in addition to using the financial ratio analysis tool also calculates and analyzes the performance of PAD through share size and growth which is then described in a form of financial capability maps using the quadrant method, and to determine the effect of financial performance on people's welfare with panel regression.

The level of majority independence is still dependent on funds from the central government. The ratio of fiscal decentralization shows that it is still not optimal. The effectiveness ratio has shown a positive trend. The efficiency ratio shows that expenditure for shopping is optimal. From the results of the analysis of regional financial capabilities, the average share and growth value of ≥ 1 are obtained so that it is said to be high. Then by mapping the regional financial capability based on the Quadrant Method, the regency and city of SWP Gerbangkertasusila Plus East Java Province is in the Quadrant I. The regional financial performance simultaneously has a positive and significant effect on people's welfare. Regional financial independence has a positive and insignificant effect. Fiscal decentralization has a positive and significant effect. Regional financial effectiveness has a positive and significant relationship. Efficiency has a positive but not significant relationship.

ملخص

مهاجريدين ، 21010861 ، 8102 ، الأداء المالي لحكومة ريجنسي أند سديتي في - المنطقة السويدية من sulP alisusatregknabreG مقاطعة جاوا الشرقية 2102 - عيرشلا جم انرب ، ةحورطأل ، عمجمل اقيمافر لباقم قنزاومل قنس 2017 الاق تصادية الدراسات العليا جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، مسد تشار (I) د. إنداه يوليانا ، س.إ.م ، مسد تشار (الثاني) د. أشمد ساني سويديان تو ، م

مع ال كلمات الرئ يسدية: الأداء المالي ، رعاية المجدت

تلتزم حكومة مقاطعة ومدينة PWS ، sulP alisusatregknabreG ، مقاطعة جاوا الشرقية بتدسين رفاهية المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى قياس الأداء المالي للحكومات المحلية ، ومعرفة الإمكانيات المالية للمنطقة ورؤية تأثير نسبة لية ، ونسبة الفعالية ، ونسبة الكفاءة المالية الاسد تقلل الإق ليمي ، ونسبة الامركزية اما مقاطعة جاوة الشرقية Gerbangkertasusila Plus ريجنسي ومدينة SWP الإقليمية على رفاهية في هذه الدراسة ، تستخدم الأداة التحليلية المستخدمة بالإضافة إلى استخدام أداة تحليل 2012-2017. متي يذلا ومنل او فكراشمل مجح لالخنم مليحتو PAD النسبة المالية أيضا في حساب أداء وصدفه في شكل من أشكال خرائط القدرة المالية باستخدام طريقة الربح ، وتحديد تأثير الأداء المالي على رفاهية الناس مع تراجع لوجه. لا يزال مسد توى اسد تقلل الأغلبية يعمد على أموال من الحكومة المركزية. تبين نسبة نسبية الالم الكفاءة أن الإندفاق على التسوق هو الأمثل. من نتائج تحليل القدرات المالية امن إلاقى شح ب $1 \geq$ الإق ليمية ، يتم الحصول على متوسط الحصة وقيمة النمو القدرة المالية الإق ليمية على أساس أسلوب الربح ، فإن مرتفعة. ثم من خلال رسم مقاطعة ومدينة PWS sulP alisusatregknabreG مقاطعة جاوا الشرقية تقع في الربع الأول. والأداء المالي الإق ليمي في نفس الوقت له تأثير إيجابي وكبير رذي دلالة على رفاهية الناس. الاسد تقلل المالي الإق ليمي له تأثير إيجابي وغي إن الامركزية المالية لها تأثير إيجابي وهلم. ال فعالية المالية الإق ليمية لها علاقة إيجابية وهلمة. الكفاءة لديها علاقة إيجابية ولكنها ليست مهمة.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Definisi istilah	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Landasan Teori	30
1. Pemerintah Daerah	30
2. Keuangan Daerah	30
3. Otonomi Daerah	33
4. Kinerja Keuangan Daerah	33
a. Rasio kemandirian keuangan daerah.....	36
b. Rasio desentralisasi fiskal.....	40
c. Rasio Efektivitas	42
d. Rasio efisiensi	43
5. Peta kemampuan keuangan daerah	45
6. Tingkat kemampuan keuangan daerah.....	48
7. Kesejahteraan dan Indeks pembangunan manusia	48
8. Kesejahteraan	53
9. Kesejahteraan Menurut Ulama.....	56
10. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Muslim	58
11. Hubungan Antar Variabel	59
11.1 Hubungan Kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat	59
11.2 hubungan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.....	62
11.3 hubungan desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat	65
11.4 hubungan efektivitas dan kesejahteraan masyarakat.....	67
11.5 hubungan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat	68
B. Kerangka Pemikiran	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Objek Penelitian.....	72
B. Jenis Penelitian	72
C. Jenis Data dan Sumber Data	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	73

E. Teknik Analisa Data	73
1. Rasio Keuangan	73
a. Kemandirian keuangan daerah.....	73
b. Desentralisasi fiskal	74
c. Efektivitas	75
d. Efisiensi	76
2. Kemampuan Keuangan Daerah	77
a. Analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i>	77
b. Pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran dan metode indeks.....	78
3. Analisis Regresi	79
3.1 Definisi operasional variabel	81
F. Membandingkan dengan standar rasio keuangan dan kesejahteraan masyarakat	83
G. Interpretasi	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Kondisi perekonomian di SWP Gerbangkertasusila Plus.....	84
B. Hasil Analisis	88
1. Kinerja keuangan daerah	88
a. Rasio kemandirian keuangan daerah	89
b. Rasio desentralisasi fiskal.....	92
c. Rasio efektivitas.....	94
d. Rasio efisiensi.....	96
2. Analisis kemampuan keuangan daerah.....	98
a. Elastisitas	99
b. Pertumbuhan PAD (<i>Growth</i>).....	101
c. Peran (<i>Share</i>)	101
d. Peta kinerja pendapatan asli daerah	103
1) Metode Kuadran	103
2) Metode Indeks	104
e. Analisis Model Regresi.....	104
1) Hasil estimasi.....	105
a. Uji Chow	105
b. Uji Hausman.....	106
2) Hasil Uji Statistik	109
a. Uji Simultan (Uji F).....	109
b. Uji Signifikan Parsial atau Individual (Uji t)	110
c. Koefisien Determinasi	112
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	113
A. Kinerja keuangan	113
a. Rasio kemandirian keuangan daerah.....	113
b. Rasio desentralisasi fiskal	115
c. Rasio efektivitas.....	116
d. Rasio efisiensi	117
B. Analisis kemampuan keuangan daerah	118
C. Analisis variabel penelitian.....	119

1. Hubungan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat.....	119
2. Hubungan kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat	122
3. Hubungan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat	126
4. Hubungan efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat.....	129
5. Hubungan efisiensi terhadap kesejahteraan masyarakat.....	131
BAB VI PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : rata-rata nilai proporsi pendapatan asli daerah di kawasan SWP Gerbangkertasusila plus (2012-2017).....	4
Gambar 2.1 : kemampuan keuangan berdasarkan metode kuadran	47
Gambar 2.2 : kerangka berfikir.....	71
Gambar 4.1 : laju pertumbuhan PDRB SWP gerbangkertasusila plus (2012-2017) (%)	84
Gambar 4.2 : rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota SWP gerbangkertasusila plus provinsi jawa timur	91
Gambar 4.3 : rata-rata rasio desentralisasi fiskal daerah kabupaten dan kota SWP gerbangkertasusila plus provinsi jawa timur TA. 2012-2017.....	94
Gambar 4.4 : rata-rata rasio efektivitas daerah kabupaten dan kota SWP gerbangkertasusila plus provinsi jawa timur TA. 2012-2017.....	96
Gambar 4.5 : rata-rata rasio efisiensi daerah kabupaten dan kota SWP gerbangkertasusila plus provinsi jawa timur TA. 2012-2017.....	98
Gambar 4.6 : peta kemampuan daerah kabupaten dan kota SWP gerbangkertasusila plus provinsi jawa timur TA. 2012-2017.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: indeks pembangunan manusia	7
Tabel 1.2	: orisinalitas penelitian	20
Tabel 2.1	: Kriteria Penilaian kemandirian Keuangan Daerah	39
Tabel 2.2	: Kriteria Penilaian rasio desentralisasi fiskal.....	42
Tabel 2.3	: kriteria penilaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah	43
Tabel 2.4	: kriteria penilaian efisiensi pengelolaan keuangan daerah	45
Tabel 2.5	: Klasifikasi Status Kemampuan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran.....	47
Tabel 2.6	: Peta Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Indeks.....	48
Tabel 4.1	: PDRB perkapita kabupaten dan kota SWP gerbangkertasusila plus 2012-2017 (ribuan rupiah)	87
Tabel 4.2	: Hasil Perhitungan Rasio kemandirian keuangan daerah (PAD terhadap Dana perimbangan) kota dan kabupaten SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017	90
Tabel 4.3	: Hasil Perhitungan Rasio desentralisasi fiskal (PAD terhadap total penerimaan daerah) kota dan kabupaten SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017.....	92
Tabel 4.4	: Hasil Perhitungan Rasio tingkat efektivitas (realisasi pendapatan terhadap target pendapatan) kota dan kabupaten SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur TA. 2012- 2017	95
Tabel 4.5	: Hasil Perhitungan Rasio tingkat efisiensi (pengeluaran belanja terhadap pendapatan) kota dan kabupaten SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017.....	97
Tabel 4.6	: elastisitas (pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan PDRB	100
Tabel 4.7	: pertumbuhan PAD (<i>Growth</i>)	101
Tabel 4.8	: <i>Share</i> (PAD terhadap total belanja	102
Tabel 4.9	: Hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan daerah.....	104
Tabel 4.10	: Hasil Estimasi Model Uji Chow	106
Tabel 4.11	: Hasil Uji Estimasi Model Hausman	107
Tabel 4.12	: Hasil Uji Regresi Panel <i>Fixed Effect</i> Model.....	107
Tabel 4.13	: Hasil Uji Simultan	110
Tabel 4.14	: Hasil Uji Signifikansi Secara parsial atau Individual (Uji-t).....	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: IPM dan realisasi PD kabupaten dan kota di kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus.....	143
Lampiran 2	: Target PAD dan realisasi belanja kabupaten dan kota dikawasan SWP Gerbangkertasusila plus.....	144
Lampiran 3	: realisasi PAD dan realisasi dana perimbangan kabupaten dan kota di kawasan SWP gerbangkertasusila.....	145
Lampiran 4	: pertumbuhan PAD kabupaten dan kota di kawasan SWP Gerbangkertasusila plus.....	146
Lampiran 5	: pertumbuhan PDRB kabupaten dan kota di kawasan SWP Gerbangkertasusila plus	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Pemda) dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan atas: azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam Undang-Undang ini menganut pengertian bahwa: (1) Pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang Pertahanan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan dan Moneter/Fiskal, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya; (2) Proses dalam pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-undangan sebelumnya¹.

Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah².

¹ UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Keuangan Daerah*

² Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 140

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai³.

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan⁴.

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah⁵. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif⁶.

³ UU No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

⁴ Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 9

⁵ Ibid, hal. 11

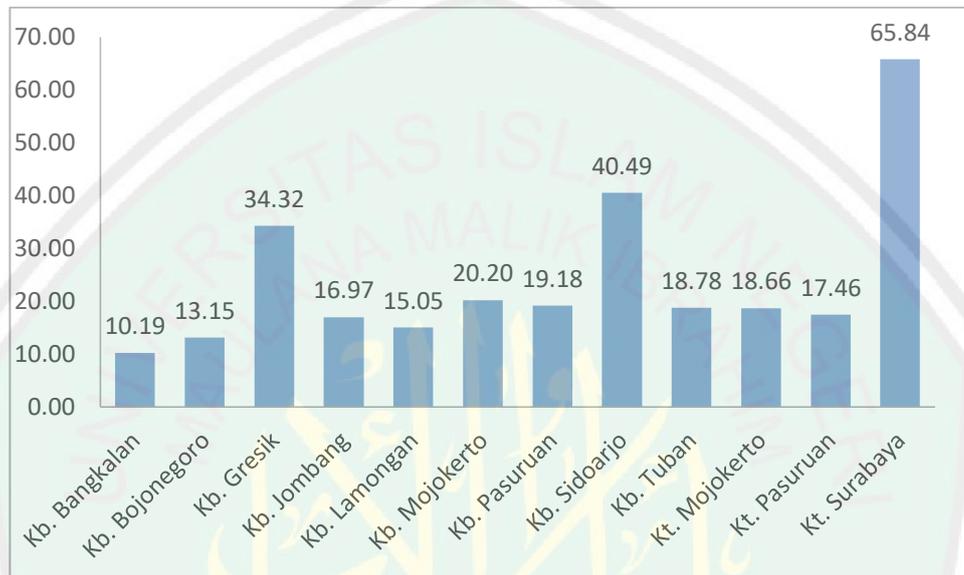
⁶ Ibid, hal. 121

Seperti yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu oleh Karlina⁷ berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Pemerintah daerah juga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan *good government* dan *clean government*.

Abate (2004) menyebutkan bahwa, dalam faktanya penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan keuangan daerah yang paling penting adalah memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup. Jika, penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah mencapai 20% dari pengeluaran daerah, maka sumber keuangan daerah sudah dapat dikatakan cukup. Meskipun, pada kenyataannya, belum banyak Kabupaten/Kota yang mencapai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota sebesar 20% dari pengeluaran daerah. Sehingga, apabila Pendapatan Asli Daerah sudah mencapai 20% maka, ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat adalah kecil. Atau dengan kata lain, semakin

⁷ Karlina, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam.....*hal 911

besar presentasi Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran daerah maka kebijakan otonomi daerah dapat dikatakan sudah semakin baik. Berikut gambaran rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah untuk 6 (enam) tahun anggaran pada gambar 1.1.



Sumber : Laporan Kinerja Pelaksanaan APBD

Gambar 1.1
Rata-rata nilai Proporsi Pendapatan Asli Daerah di Kawasan SWP
Gerbangkertosusila Plus (2012-2017)

Dari grafik diatas dapat dilihat, dari 12 Kabupaten/Kota yang termasuk kedalam SWP Gerbangkertosusila Plus. Ternyata hanya ada delapan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran pemerintah yang rendah, yaitu dengan nilai proporsi kurang dari 20%. Kedelapan Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya

sebagian besar digunakan bukan untuk belanja pembangunan, akan tetapi digunakan untuk kepentingan belanja pegawai, Selain itu, rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena, kurangnya Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada. Sehingga, membuat Pemerintah Daerah kurang optimal dalam mengembangkan basis daerah yang ada. Menurut Sidik (2000) dalam Maryati dan Endrawati (2010)⁸ menjelaskan bahwa besaran jumlah PAD yang diterima suatu daerah sebaiknya tidak menjadi ukuran dari pergerakan aktivitas perekonomian, namun diukur dari sejauh mana PAD tersebut dalam mengatur aktivitas perekonomian di daerah, sehingga selanjutnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan Masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh kasmir, Rita, & Citrawati, 2017, menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan daerah dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Lampung⁹. Mangkoesoebroto (1998) menyatakan bahwa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah sendiri dapat dipakai sebagai salah satu indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pengeluaran pemerintah tersebut.

⁸ Maryati, Ulfa & Endrawati, *Pengaruh Pendapatan (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*, (Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2010), Vol 5, No. 2, Hal, 2

⁹ kasmir, R. I., & C. J. (2017). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. *Jurnal Keuangan Bisnis*, 101.

Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional merupakan suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian. Sukirno (2008) mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah atau *Government Expenditure* merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, meningkatkan tingkat output, dan meningkatkan kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Selain pertumbuhan ekonomi, komponen lain yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan manusia atau yang biasa dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada dasarnya tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber keuangan, baik dengan teknologi maupun pada kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai suatu kesejahteraan.

Berikut data perkembangan IPM di kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur. Data perkembangan IPM dapat dilihat di Table 1.1.

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Wilayah	IPM								Rata2
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Bangkalan	57.23	58.63	59.65	60.19	60.71	61.49	62.06	62.3	60.28
Kabupaten Bojonegoro	62.19	63.22	64.2	64.85	65.27	66.17	66.73	67.28	64.99
Kabupaten Gresik	69.9	71.11	72.12	72.47	72.84	73.57	74.46	74.84	72.66
Kabupaten Jombang	66.2	66.84	67.82	68.63	69.07	69.59	70.03	70.88	68.63
Kabupaten Lamongan	65.4	66.21	67.51	68.9	69.42	69.84	70.34	71.11	68.59
Kabupaten Mojokerto	68.14	68.71	69.17	69.84	70.22	70.85	71.38	72.36	70.08
Kabupaten Pasuruan	60.79	61.43	62.31	63.74	64.35	65.04	65.71	66.69	63.76
Kabupaten Sidoarjo	73.75	74.48	75.14	76.39	76.78	77.43	78.17	78.7	76.36
Kabupaten Tuban	61.33	62.47	63.36	64.14	64.58	65.52	66.19	66.77	64.30
Kota Mojokerto	72.78	73.47	74.2	74.91	75.04	75.54	76.38	76.77	74.89
Kota Pasuruan	69.69	70.41	72.01	72.89	73.23	73.78	74.11	74.39	72.56
Kota Surabaya	77.2	77.62	78.05	78.51	78.87	79.47	80.38	81.07	78.90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Diolah 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kabupaten dan kota yang memiliki rata-rata IPM tinggi yakni Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kt. Mojokerto, Kt. Pasuruan, dan Kt. Surabaya dengan klasifikasi IPM *tinggi* dengan rata-rata IPM antara $70 < IPM < 80$, sedangkan Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, dan Kab. Tuban berada pada klasifikasi IPM *sedang* dengan rata-rata IPM antar $60 < IPM < 70$.

Menurut Bastian (2001) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga

pada keluaran manfaat dari program tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pemabangunan daerahnya¹⁰.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangannya secara optimal, melalui indikator kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013)¹¹, yang menggunakan analisis rasio terhadap APBD, menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus membaik, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerah meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negative seperti rasio aktivitas dan pertumbuhan.

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa penggunaan analisa rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga

¹⁰ Mariana, L. , *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah pemekaran daerah (studi empiris pada kabupaten/kota si Sumatera Barat)*, (pp : juni 2013), Hal 1-16

¹¹ Agustina, *analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah.....*

perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Maka dirasa perlu untuk meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah kota di Jawa Timur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan otonomi di masing-masing daerah tersebut dengan menggunakan alat analisis rasio Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.

Menurut Widodo (2001)¹² rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman.

Berdasarkan literatur lain dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas, dan sumber-sumber yang berkaitan (seperti: keuangan, karyawan, dll) dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah¹³.

¹² Widodo, Joko. *Good Governance: telaah dari dimensi: akuntabilitas dan control birokrasi pada era desentralisasi dan tonomi daerah*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2001), Hal 150

¹³ Akhmad mulyana, *Sosiologi Komunikasi*, (pusat pengembangan bahan ajar UMB, 2006), hal 26

Selain itu dijelaskan oleh Halim (2011)¹⁴ yakni rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

Kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, dan efektivitas, dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya kesejahteraan rakyat.

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Ada beberapa peneliti sebelumnya, yang mengangkat permasalahan kinerja keuangan. Seperti halnya yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu oleh Nirwana (2014)¹⁵, Dkk menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Analisis rasio keuangan ini akan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Rendahnya kapasitas kemampuan pemerintah daerah dalam

¹⁴ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hal 255

¹⁵ Nirwana, E., Taufik, T., & Ratnawati, V, *Evaluasi kinerja keuangan dan tingkat.....*hal 3-4

mengelola keuangan daerah akan memberikan dampak negative seperti rendahnya *publik service* atau tingkat pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pembangunan di daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Wahyudi & Tarunasari, L.F (2013)¹⁶, menunjukkan kemandirian lokal dan pertumbuhan yang rendah. Peneliti sebelumnya seperti Bisma dan Susanto (2010)¹⁷, menjelaskan desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien. Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwar, dkk (2014)¹⁸, efektivitas kinerja keuangan lokal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Mahmudi(2011)¹⁹, efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Dalam penelitian sebelumnya oleh Azwar, dkk (2014)²⁰, menjelaskan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial memiliki efek negative tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi dalam penjelasan UU nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa prinsip otonomi dan kewenangan seluas-luasnya diberikan

¹⁶ Wahyudi & Tarunasari, L.F, *mengukur kinerja pemerintah daerah melalui.....*

¹⁷ Bisma, I.G & Susanto, H., *Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi.....*

¹⁸ Azwar, & Subekan, A, *Kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan.....*

¹⁹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal 171

²⁰ Azwar, & Subekan, A, *kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan.....*

kepada pemerintah daerah pada akhirnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah dijamin oleh Tuhan. Memang sumber-sumber daya yang disediakan Tuhan di dunia ini tidak terbatas, namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit tetapi dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan perasaan tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Tuhan dan maqasidnya.²¹

Diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah kabupaten dan kota. Untuk membuat peta kemampuan digunakan sejumlah parameter yaitu: perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui *share* dan *growth*²².

Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya.

²¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal 205

²² Bappenas, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, (Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah), hal 1

Dengan parameter tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk suatu peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran. Yang dimaksud dengan metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka masing-masing provinsi dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa).

Dari hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Bisma²³, dkk dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (*share*) terhadap total pendapatan masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan pada PAD, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan belanja, maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja keuangan dan hubungannya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota Di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur. Alasan dari penggunaan objek ini adalah karena wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dan adanya ketersediaan data. Sehingga penulis tertarik untuk menagangkat judul judul sebagai berikut **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Kawasan Swp Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

²³ Bisma, I.G., & Susanto, H., *Evaluasi Kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi*hal 85

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur selama enam tahun terakhir (Tahun Anggaran 2012-2017) dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi ?
2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 diukur melalui *share* dan *growth* APBD, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah ?
3. Apakah Rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisisensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur ?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa tercapai dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pembahasan kinerja keuangan daerah. Menurut Halim (2004) beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain²⁴. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi selama enam tahun terakhir di Kabupaten dan

²⁴ Abdul halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: salmbe empat, 2004), hal 150-158

Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 serta kemampuan keuangan. dan apakah Rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisisensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan Regresi Panel.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi selama enam tahun terakhir (tahun 2012-2017).
- b. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 diukur melalui *share* dan *growth* APBD, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisisensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis di antaranya adalah :

- a. Manfaat praktis, menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kinerja keuangan daerah.
- b. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian di bidang keuangan daerah dan secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan keuangan daerah di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan peneliti terdahulu dibawah ini :

Wahyudi & Tarunasari, L.F, alat analisis yang digunakan yakni rasio keuangan meliputi: rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas, efisiensi, rasio cakupan layanan utang, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio keuangan anggaran pemerintah kabupaten Bogor untuk tahun 2003-2006 tahun fiskal menunjukkan kemandirian lokal dan pertumbuhan lokal yang rendah. Namun, pemerintah kabupaten kabupaten Bogor telah efektif dan efisien dalam menggunakan pendapatannya. Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bogor masih sangat

bergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih rendah²⁵.

Puspitasari, alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah²⁶.

Agustina, alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio terhadap APBD. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan²⁷.

²⁵ Wahyudi & Tarunasari, L.F, *Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui*

²⁶ Puspitasari, A.F, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.....

²⁷ Agustina, *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*.....

Karlina, A, & Handayani, N, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Analisis varians pendapatan daerah, 2) Analisis Rasio keuangan daerah, 3) Analisis varians belanja daerah, 4) Analisis keserasian belanja daerah, 5) Analisis efisiensi belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota Surabaya secara umum dikatakan kurang baik dalam varians pendapatan, 2) Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah kota Surabaya Secara umum dapat dikatakan baik²⁸.

Tama, A. I, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analitik terhadap kinerja keuangan kabupaten. Paired sample t-test dengan tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk menguji hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan pada kinerja keuangan kabupaten. Dalam bentuk indikator kemerdekaan, tingkat desentralisasi, efisiensi pajak daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi lebih tinggi pada periode sebelum pelaksanaan, tetapi untuk ketergantungan keuangan lebih rendah pada periode setelah implementasi. Disisi lain, tidak ada perbedaan dalam bentuk efektivitas keuangan kabupaten sebelum dan sesudah undang-undang²⁹.

Alvionita, W, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi keuangan daerah, hasilnya diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan Kabupaten Daerah Maros pada tahun 2013 hingga 2017

²⁸ Karlina, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam*.....

²⁹ Tama, *Analisis, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui*.....

adalah 94,16% atau dapat dikatakan kurang efisien. Secara konsisten dari 2013 hingga 2017, rasio masing-masing 88,84%; 91,72%; 99,03%; Dan 97,05%³⁰.

Bisma dan Susanto (2010), alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah *Sangat Tinggi* terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah *Sangat Kurang*. Desentralisasi Fiskal *Cukup* mengingat ketergantungan keuangan terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan APBD *Sangat Efektif*, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil *Tidak Efisien*. Sumbangan PAD (*share*) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan pada PAD, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan Belanja, maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil³¹.

Azwar,dkk (2014)³², Alat analisis yang digunakan Regresi Panel dengan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan lokal secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Tingkat otonomi daerah

³⁰ Alvionita, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

³¹ Bisma, I.G., & Susanto, H., *Evaluasi Kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi*

³² Azwar, & Subekan, A, *kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan*.....

secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap sosial. Sementara itu, efektivitas kinerja keuangan lokal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial, dan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Alat Analisis	Hasil	Orisinalitas penelitian
Wahyudi & Taruna, L.F, Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah. 2013	rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas, efisiensi, rasio cakupan layanan utang, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan	<p>Hasil perhitungan rasio keuangan anggaran pemerintah kabupaten Bogor untuk tahun 2003-2006 tahun fiskal menunjukkan kemandirian lokal dan pertumbuhan lokal yang rendah. Namun, pemerintah kabupaten Bogor telah efektif dan efisien dalam menggunakan pendapatannya. Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bogor masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih rendah</p>	<p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan alat rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas, efisiensi, rasio cakupan layanan utang, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan, namun dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam</p>

			suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat
Puspitasari, A.F. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011, 2013, 2013	Rasio keuangan	Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan alat analisis rasio keuangan. namun dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk

			mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat.
Agustina, O, Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), 2013	rasio terhadap APBD	Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki <i>trend</i> negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan alat analisis rasio terhadap APBD. Namun dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karlina, A., & Handayani, N. Analisis Kinerja Keuangan	1) Analisis varians pendapatan daerah, 2)	hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang

<p>Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015, 2017</p>	<p>Analisis Rasio keuangan daerah, 3) Analisis varians belanja daerah, 4) Analisis keserasian belanja daerah, 5) Analisis efisiensi belanja daerah.</p>	<p>dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota Surabaya secara umum dikatakan kurang baik dalam varians pendapatan, 2) Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah kota Surabaya Secara umum dapat dikatakan baik</p>	<p>dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan alat Analisis varians pendapatan daerah, 2) Analisis Rasio keuangan daerah, 3) Analisis varians belanja daerah, 4) Analisis keserasian belanja daerah, 5) Analisis efisiensi belanja daerah.. Namun dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Tama, A. I, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis</p>	<p>studi analitik terhadap kinerja keuangan kabupaten. Paired sample t-</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan pada kinerja keuangan kabupaten. Dalam bentuk indikator</p>	<p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang</p>

<p>Rasio Keuangan Apbd Kabupaten/Kota Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2015</p>	<p>test dengan tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk menguji hipotesis</p>	<p>kemerdekaan, tingkat desentralisasi, efisiensi pajak daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi lebih tinggi pada periode sebelum pelaksanaan, tetapi untuk ketergantungan keuangan lebih rendah pada periode setelah implementasi. Disisi lain, tidak ada perbedaan dalam bentuk efektivitas keuangan kabupaten sebelum dan sesudah undang-undang</p>	<p>dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Alat analisis Penelitian sebelumnya hanya menggunakan alat studi analitik terhadap kinerja keuangan kabupaten. Paired sample t-test dengan tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk menguji hipotesis. namun dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Alvionita, W, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, 2017</p>	<p>rasio efisiensi keuangan daerah</p>	<p>hasilnya diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan Kabupaten Daerah Maros pada tahun 2013 hingga 2017 adalah</p>	<p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kinerja</p>

		<p>94,16% atau dapat dikatakan kurang efisien. Secara konsisten dari 2013 hingga 2017, rasio masing-masing 88,84%; 91,72%; 99,03%; Dan 97,05%</p>	<p>keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan alat analisis rasio efisiensi keuangan daerah, namun dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Bisma, I. G., & Susanto, H, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, 2010</p>	<p>Rasio Keuangan, <i>Share</i> dan <i>growth</i></p>	<p>Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara</p>	<p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan alat rasio keuangan, <i>share</i> dan <i>growth</i>, namun dalam</p>

		<p>lain; Ketergantungan Keuangan Daerah <i>Sangat Tinggi</i> terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah <i>Sangat Kurang</i>. Desentralisasi Fiskal <i>Cukup</i> mengingat ketergantungan keuangan terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan APBD <i>Sangat Efektif</i>, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil <i>Tidak Efisien</i>. Sumbangan PAD (<i>share</i>) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan pada PAD, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan Belanja, maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil</p>	<p>penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Azwar, & Subekan, A., Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-</p>	<p>Rasio keuangan, Regresi Panel dengan Random Effect Model (REM)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan lokal secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Tingkat otonomi daerah secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan</p>	<p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya</p>

2012), 2014		<p>terhadap sosial. Sementara itu, efektivitas kinerja keuangan lokal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial, dan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.</p>	<p>menggunakan alat rasio keuangan, regresi panel dengan random effect model (REM), namun dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standart rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran <i>share</i> dan <i>growth</i> yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan menguji hasil perhitungan rasio dengan menggunakan alat regresi panel untuk mengetahui pengaruh perhitungan rasio terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
-------------	--	--	---

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi & Taruna, L.F (2013), Puspitasari, A.F 2013, Agustina, O (2013), Karlina, A & Handayani, N (2017), Tama, A,I (2015), Alvionita, W (2017), dan Bisma, I.G & Susanto, H (2010), Azwar, & Subekan, A.,(2014). Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan teknik analisis yang sama yaitu deskriptif, hanya saja tempat dan waktu yang berbeda dan alat analisis yang sedikit berbeda.

Enam penelitian terdahulu yakni Wahyudi & Taruna, L.F (2013), Puspitasari, A.F (2013), Agustina, O (2013), Karlina, A & Handayani, N (2017), Tama, A,I (2015), Alvionita, W (2017) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bisma, I.G & Susanto, H (2010) selain menggunakan alat analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standar rasio juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth* yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Azwar, & Subekan, A.,(2014), menggunakan alat analisis rasio keuangan dan Regresi Panel dengan Random Effect Model (REM).

Penelitian ini merupakan penggabungan dan pengembangan dari delapan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi & Taruna, L.F (2013), Puspitasari, A.F 2013, Agustina, O (2013), Karlina, A & Handayani, N (2017), Tama, A,I (2015), Alvionita, W (2017), dan Bisma, I.G & Susanto, H (2010), Azwar, & Subekan, A.,(2014). Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan selain menggunakan alat analisis rasio keuangan juga melakukan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth* yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran, dan untuk mengetahui pengaruh dari kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat maka dilakukan dengan regresi panel.

F. Definisi Istilah

Kinerja Keuangan Pemerintah adalah sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Rasio Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan.

Rasio Efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya.

Rasio efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efektivitas dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya.

Share adalah rasio untuk mengukur kemampuan Provinsi Jawa Timur membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan.

Growth adalah angka pertumbuhan PAD tahun I dari tahun i-1.

Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemerintah Daerah

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia³³.

Dasar hukum pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah³⁴, maka disusunlah Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan daerah³⁵.

2. Keuangan Daerah

Dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut: “keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”³⁶ selanjutnya dalam pasal 1 peraturan

³³ UUD 1945

³⁴ UU No.32 Tahun 2004

³⁵ UU No.23 Tahun 2014

³⁶ Pasal 156 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004

pemerintah ri no. 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keungan daerah adalah sebagai berikut: “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah”³⁷

Sementara Mamesah menyatakan “keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku³⁸.

Dalam litelatur lain dijelaskan bahwa menurut ulama klasik, seperti abu ubaid yang menulis kitab *Al-Amwal*, ungkapan yang digunakan olehnya mengenai ekonomi publik adalah: *sunuful anwaal allati yahliiha al-a'immah lirro'iyah*, yang artinya beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah oleh rakyat³⁹. Nurul Huda menyimpulkan bahwa terdapat empat konsep dalam definisi diatas, yaitu *anwal* (harta kekayaan), *wilayah* (pengelolaan), *imamah* (pemerintah), dan *ro'iyah* (rakyat).

Yang dimaksud dengan amwal adalah kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai konsep perwalian/pengelolaan kekayaan publik. Sedangkan yang

³⁷ Pasal 1 Peraturan pemerintah RI No. 58 Tahun 2005

³⁸ Abdul Halim, *AKuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hal 25

³⁹ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan publik islam pendekatan AL-Kharaj*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal 9

dimaksud dengan *imamah* dan *ro'iyah* adalah pemerintah dan rakyat, dimana syariat mutlak suatu pemerintahan adalah kepercayaan (*amanah*). Otoritas publik diharuskan memerintah berdasarkan kita Allah, bertanggung jawab dan adil, jika pemerintah dapat memnuhi persyaratan tersebut, maka wajib bagi rakyat untuk mematuhi⁴⁰.

Keuangan publik berhubungan dengan peran Negara dalam menganalisa dampak-dampak perpajakan dalam pembelanjaan Negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, juga menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan⁴¹. Dalam sejarah islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan Negara islma oleh rosulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Sebelum Negara dibentuk perintah-perintah wahyu menegaskan perintah menyantuni orang miskin secara sukarela. Sebagaimana salah satu firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Q.S AL-Ma'arij : 24-25)

Abu ubaid (2012), berpendapat bahwa andil pemerintah/Negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas pemerintah/Negara adalah menegakan kehidupan social dan menumbuhkan kepedulian social. Melalui peraturan administrasi keuangan negra secara efektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat

⁴⁰ Ibid, hal 9-10

⁴¹ Ibid, hal 10

yang pada akhirnya terselenggara kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Abu ubaid (2012) juga berpendapat, bahwa pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqashid syariah⁴².

Menurut M. Umar Chapra (2012), efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran islam tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas⁴³.

3. Otonomi Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar⁴⁴.

4. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut penelitian yang dilakukan Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang

⁴² Nurul Hudadkk, *keuangan publik islam pendekatan teori dan sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), Hal 6

⁴³ Ibid, Hal 168

⁴⁴ Nataluddin, *Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), Hal 167

meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD⁴⁵.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2013) “analisis kinerja keuangan adalah usaha

⁴⁵ Agustina, Oesi, *Analisis Kinerja Pengelolaan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*, (jurnal, 2013), hal 3

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan tingkat pembiayaan SiLPA.

Menurut Erlina (2008), Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses, atau suatu organisasi. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Abdul dan Muhammad (2012), pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Sedangkan menurut Halim mengemukakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain⁴⁶:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman⁴⁷.

Menurut Suyana Utama (2008), rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah atau yang biasa dikenal dengan kemandirian fiskal adalah salah satu aspek yang sangat penting dari adanya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Mardiasmo (1999) menyatakan bahwa, ada beberapa manfaat yang didapatkan apabila suatu daerah sudah mampu atau mandiri dalam hal keuangan, diantaranya adalah; 1) mampu untuk mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi-potensi yang tersedia di daerah, 2) mampu untuk memperbaiki alokasi sumber daya

⁴⁶ Abdul halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: salmbe empat, 2004), hal 150-158

⁴⁷ Abdul halim, *Akuntansi Sector Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba empat, 2012), hal 128

produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dan memiliki informasi yang lebih lengkap.

Pada dasarnya, kemandirian fiskal sendiri menggambarkan tentang bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain dan pembangunan daerah yang bisa diwujudkan dengan adanya pelaksanaan kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti, pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independent terhadap pemerintah pusat dengan tujuan untuk menggali sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Radianto (1997).

World Bank (1994) dalam Suhab (1997) menjelaskan bahwa, kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa memiliki ketergantungan dari pemerintah pusat maupun pihak eksternal. Halim (2001) menjelaskan bahwa ada dua ciri suatu daerah sudah mampu dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, diantaranya adalah 1) kemampuan keuangan daerah, dimana daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan 2) ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Oleh sebab itu, Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Halim (2001) menyatakan bahwa, secara konseptual pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. walaupun, pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan sedikit menimbulkan beberapa perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001), memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Hubungan situasional tersebut dibagi menjadi empat kelompok, diantaranya adalah :

1. Pola Hubungan Instruktif, pola ini menjelaskan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, atau dengan kata lain pemerintah daerah belum mampu untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah.
2. Pola Hubungan Konsultif, pola ini menjelaskan bagaimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai sedikit berkurang. Hal ini dikarenakan karena, pemerintah daerah sudah sedikit mampu dalam melaksanakan dan menerapkan kebijakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, pola ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena daerah yang bersangkutan sudah memiliki tingkat kemandirian yang mendekati mampu dalam melaksanakan kebijakan ini.

4. Pola Hubungan Delegatif, pola yang terakhir ini menjelaskan bahwa, peranan pemerintah pusat sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan, daerah sudah mampu menggali potensi-potensi daerah yang ada. Sehingga, pola ini menunjukkan bahwa, daerah sudah benar-benar terbebas dari bantuan pusat maupun pihak eksternal.

Rasio Kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Adapun standar untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tertera pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Standar Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemampuan Keuangan
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 2010

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan⁴⁸.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, maka dengan adanya penyerahan wewenang tersebut dibentuk dan disusunlah pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonom. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai salah satu tujuan bernegara khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Menurut Saragih (2003), Desentralisasi Fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk melaksanakan fungsi atau tugas pemerintahan secara efektif dan mendapat kebebasan pengambilan keputusan

⁴⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba empat, 2007), hal 234

dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan⁴⁹.

Pengertian dan konsep desentralisasi fiskal menurut Macfud Sidik (2001), desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Menurut Robert Simanjuntak (2002) sasaran desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum adalah:

- a. Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah.
- b. Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- d. Mengurangi ketimpangan antar daerah.
- e. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

⁴⁹ Saragih, Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hal: 83

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal

Standar Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 2010

c. Rasio Efektivitas

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen Suyana Utama, (2008).

Rasio Efektivitas yang dijelaskan oleh Halim (2002), menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Amin (2000) menyatakan bahwa persentase trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Analisis *trend* digunakan untuk mengetahui, baik arah perkembangan kemandirian keuangan maupun efektivitas keuangan daerah.

Pengukuran tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan PEMDA dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Prosentase Realisasi Pendapatan Terhadap Target Pendapatan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektivitas
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi⁵⁰

d. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan⁵¹.

⁵⁰ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Ull press, 2011), Hal 171

⁵¹ Ibid, Hal 171

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen⁵². Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan Mahsun (2006).

Menurut kamus besar ekonomi (2003) menyatakan bahwa efisiensi adalah : “Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (*output*) barang dan jasa dengan masukan (*input*) yang langka di dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)⁵³.”

Menurut mulyadi (2007) mengemukakan bahwa : “efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio *input* dan *output* biaya dan keuntungan⁵⁴.”

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001) menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu

⁵² Suyana Utama, *Buku ajar aplikasi kuantitatif*, (Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2009), Hal: 30

⁵³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2003) Hal, 178

⁵⁴ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal, 63

(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatan, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).

Dari uraian disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan biaya.

Adapun standar untuk menetapkan rasio efisiensi dapat dikategorikan seperti tertera pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Efisiensi
Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Prosentase Pengeluaran Belanja terhadap Pendapatan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi⁵⁵

5. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah

⁵⁵ Ibid, Hal 171

pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat⁵⁶.

Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki⁵⁷.

Adanya kondisi tersebut, diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah kabupaten dan kota. Untuk membuat peta kemampuan digunakan sejumlah parameter yaitu: Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth*. *Share* merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya⁵⁸.

Share dan *growth* dikatakan “tinggi” apabila memiliki nilai ≥ 1 , namun juga dikatakan “rendah” apabila *share* dan *growth* memiliki nilai < 1 . Parameter tersebut kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran. Metode kuadran adalah salah satu cara untuk menampilkan peta kemampuan keuangan daerah.

⁵⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: 2002), Hal. 68

⁵⁷ Bappenas, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, (Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah), hal 1

⁵⁸ Ibid, Hal 3

GROWTH (%)		
SHARE (%)	KUADRAN II	KUADRAN I
	<i>Share : Rendah</i>	<i>Share : Tinggi</i>
	<i>Growth : Tinggi</i>	<i>Growth : Tinggi</i>
	KUADRAN IV	KUADRAN III
	<i>Share : Rendah</i>	<i>Share : Tinggi</i>
	<i>Growth : Rendah</i>	<i>Growth : Rendah</i>

GROWTH (%)

Sumber : Bappenas 2003

Gambar 2.1:
Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran

Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *share* dan *growth*, maka masing-masing provinsi dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa). Kondisi masing-masing kuadran dijelaskan pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Klasifikasi Status Kemampuan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Beppenas 2003

6. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Tingkat kemampuan keuangan daerah menggambarkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dengan mengukur *share* dan *growth*. Adapun kriteria untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah seperti pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Indeks

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0,34-0,43	Sedang
0,44-1,00	Tinggi

Sumber : Bappenas, 2003⁵⁹

7. Kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia

Dijelaskan dalam penelitian Azwar, dkk⁶⁰ United Nations Programme (UNDP) mengartikan kesejahteraan secara lebih luas lebih dari hanya sekedar pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita, yaitu dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penelitian Nirwana, dkk⁶¹ dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial menurut UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

⁵⁹ Ibid, Hal 4-12

⁶⁰ Azwar, & Subekan, A, *Kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan rakyat di era desentralisasi fiskal (studi empiris pada kabupaten/kota provinsi Sulawesi selatan ta 2008-2012*, (Info Artha STAN, 2014), hal 5-6

⁶¹ Nirwana, E., Taufik, T, & Ratnawati, V, *evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada pemerintahan kabupaten bengkalis*, (Sorot: 2014), hal 6

Hakekat Pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Budiman bahwa pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. lebih dalam menurut Suradi menjelaskan makna pembangunan manusia sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan social. Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah IPM atau disebut juga dengan *Human Development Index* (HDI).

Rasio IPM ini memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: 1) panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), 2) terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi), dan 3) memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). Perlu dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pemabangunan manusia secara relative, bukan absolut.

HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah Negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu : Badan Pusat Statistik (2015) :

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio.
3. Standar hidup yang layak diukur dengan GDP per kapita dalam paritas kekuatan daya beli (*Purchasing Power Parity*) dalam Dollar AS.

Berikut penjelasan dari masing-masing komponen dalam mengukur IPM

a. Angka Harapan Hidup

Untuk hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth) yang dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live births) dan rata-rata anak yang masih hidup (still living) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks memakai usia 85 tahun dan batas bawah 25 tahun, BPS (2009).

b. Tingkat Pendidikan

Indikator yang digunakan dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling -MYS) dan angka melek huruf. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis, sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Angka melek huruf adalah presentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 (seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menunjukkan bahwa semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingka kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk, sebagai dampa semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per

kapita riil disesuaikan dengan formula Atkinson. Dari ketiga komponen IPM di atas, maka capaian IPM dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks} = (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Dimana :

X_i = Indikator Komponen IPM ke- i ($i = 1, 2, 3$)

X_{\min} = Nilai minimum X_i

X_{\max} = Nilai Maksimum X_i

Persamaan diatas akan menghasilkan nilai $0 < X_i < 1$, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 < X_i < 100$. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis,

$$\text{IPM} = 1/3 X_i = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3))$$

Dimana :

$X(1)$ = Indeks Angka Harapan Hidup

$X(2)$ = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata-rata lama sekolah)

$X(3)$ = Indeks Konsumsi per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengelompokkan capaian IPM menjadi empat kategori, yaitu: kategori tinggi dengan nilai IPM > 80 , kategori menengah atas dengan $66 < \text{IPM} < 80$, kategori menengah bawah dengan $50 < \text{IPM} < 66$, dan kategori rendah dengan $\text{IPM} < 50$.

8. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesusahan dan sebagainya. Kesejahteraan berarti suatu keadaan dimana seseorang merasa bahwa dirinya aman, selamat, tentram, senang dan makmur.⁶² Seseorang bisa dikatakan sejahtera apabila mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka baik itu jasmani maupun rohani dan terbebas dari kesedihan atau kesusahan dalam hidup.

Penjelasan kesejahteraan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 1976 pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kehidupan dan penghidupan materiil maupun spiritual yang diiringi dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenangan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban sesuai dengan pancasila⁶³.

Dalam penjelasan lain kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi mereka berupa kehidupan sosialnya⁶⁴. Sedangkan definisi kesejahteraan menurut Ahmad Zaki Badawi yakni :

⁶² Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1284

⁶³ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 309

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

الرفاهية: الحالة التي تتحقق فيها الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع من

غذاء وتعليم وصحة وتأمين ضد كوارث الحياة

“Kesejahteraan (Welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan”⁶⁵

Menurut Jaih Mubyanto menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang dalam batas yang mungkin dicapai oleh perorangan. Dimana dijelaskan juga bahwa kriteria orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah : (1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, (2) terpelihara kesehatannya, (3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak, selain itu kesejahteraan mencakup unsur batin yakni perasaan untuk ingin diperlakukan secara adil dalam hidup⁶⁶.

Kesejahteraan memiliki berbagai definisi dan pandangan diantaranya yaitu : *Pertama*, prespektif hedonis dan materialisme murni yang menjelaskan dimana keadaan sejahtera terjadi apabila manusia memiliki keberlimpahan materi sehingga dapat mencukupi penyediaan barang dan jasa dalam memaksimalkan fungsi kekayaan, kenikmatan fisik dan dunia serta kepuasan hawa nafsu. *Kedua*, prespektif kapitalisme demokratik menjelaskan bahwa sejahtera adalah kondisi yang dapat membahagiakan individu dimana kebebasan individu menjadi tujuan utama yang mencakup kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir dan kebebasan personal. *Ketiga*, prespektif sosialisme menjelaskan kesejahteraan

⁶⁵ Dr. Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah*, (Beirut, Maktabah Lubnan : New Impression, 1982), 445

⁶⁶ Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), 22-23

sebagai suatu keadaan yang dapat membahagiakan masyarakat secara umum dan menyeluruh secara kolektif⁶⁷.

Tahapan kesejahteraan dijelaskan oleh Mukhlisin Muzarie yang mengadopsi teori milik Abraham Maslow menyebutkan kesejahteraan sosial diperoleh secara dimana tahap pertama adalah terpenuhi kebutuhan fisik atau kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, diikuti oleh kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan, dan tahap terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dan hal ini ditempuh secara bertahap dan berurutan⁶⁸.

Dalam penjelasan lebih lanjut, kesejahteraan dalam pandangan Islam berarti adalah seseorang yang merasa aman, sentosa dan damai. Dimana hal ini sejalan dengan misi Rasulullah Saw yang dinyatakan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

Menurut Umer Chapra dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah merealisasikan tujuan manusia untuk dapat mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat (falah) serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah)⁶⁹.

⁶⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 12

⁶⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 311

⁶⁹ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7

9. Kesejahteraan Menurut Ulama

Ekonomi Islam telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi islam muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi dalam sejarah islam, sehingga inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi islam. Para Ulama berperan besar dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

Sesungguhnya mengkaji ekonomi islam bukanlah dominasi para ekonomi. Tetapi kajian ekonomi islam hendaknya dilakukan para pakar islam yang menguasai pandangan islam dengan segala aspeknya yang sempurna. Kemudian setelah ini, baru pengkajian berpindah pada para spesialis, spesialis perekonomian merumuskan sistem perekonomian dengan tetap membuat pandangan islam sebagai landasan dan acuan dasar. Pandangan islam meliputi syariahnya, yang berkait dengan sistem perekonomian maupun yang berkait dengan sosial kemasyarakatan.⁷⁰

Al-Ghazali dalam Kitabnya *Ihya Ulum al-Din* dan *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* mengartikan atau memaknai ilmu ekonomi sebagai berikut :⁷¹ sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni wajib dituntut secara Fard Ayn dan Fard Kifayah (termasuk ilmu

⁷⁰ An Nabahan, Sistem 1.

⁷¹ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), Hal 53-56.

ekonomi), dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup (masalah).

Berdasarkan deskripsi al-Ghazali diatas, pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (al-iktisab) yang wajib dituntut (fard kifayah) berlandaskan etika (Syariah) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat. Definisi ini membawa kepada pemikiran bahwa ilmu ekonomi memiliki dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah.⁷²

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasi kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷³

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam maqasid al-shari'ah. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu

⁷² Ibid., Hal 57.

⁷³ Ibid., Hal 84-86.

menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan Syariah.

10. Kesejahteraan menurut ekonomi muslim

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya system ekonomi apapun termasuk ekonomi islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (the three fundamental and independent economic problem). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan siapa distribusinya.⁷⁴

Sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal diseluruh sector produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal.

Kecerdasan ismail merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kesejahteraan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kauntitas, dan penggunaanya sesuai syariah.⁷⁵

⁷⁴ Abdur Rohman, *ekonomi Al-Ghazali, menelusuri konsep ekonomi islam dalam ihya' ulum al-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), Hal 84-86

⁷⁵ *Ibid*, hal 113

Dalam kenyataannya, tidak semua manusia memiliki kecerdasan spiritual sebagaimana yang dijelaskan diatas. Adapun ciri-ciri manusia yang memiliki ciri-ciri kecerdasan adalah:⁷⁶ setia dan taat kepada allah (*habl min allah*), setia dan konsisten memberikan manfaat atau pelayanan terbaik kepada sesama manusia (*habl min al-nas*), dan setia, serta konsisten dengan pemelihara alam dan lingkungan yang seimbang (*habl min al-alamini*).

Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah dijamin oleh tuhan. Memang sumber-sumber daya yang disediakan tuhan didunia ini tidak terbatas, namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternative dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit tetapi dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan perasaan tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Tuhan dan maqasidnya.⁷⁷

11. Hubungan Antar Variabel

11.1 Hubungan Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan

⁷⁶ *Ibid*, hal 113-114

⁷⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal 205

belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Menurut Erlina (2008), Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses, atau suatu organisasi. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya⁷⁸.

Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan

⁷⁸ Mariana, L. , *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah pemekaran daerah (studi empiris pada kabupaten/kota si Sumatera Barat)*, (pp : juni 2013), Hal 1-16

masyarakat. kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangannya secara optimal, melalui indikator kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi yang baik. Pemerintah daerah yang menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013)⁷⁹, yang menggunakan analisis rasio terhadap APBD, menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus membaik, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerah meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negative seperti rasio aktivitas dan pertumbuhan.

Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut :

⁷⁹ Agustina, *analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah*.....

H_1 : Kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

11.2 Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Widodo⁸⁰ rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman.

Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah

⁸⁰ Widodo, Joko. *Good Governance: telaah dari dimensi: akuntabilitas dan control birokrasi pada era desentralisasi dan tonomi daerah*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2001), Hal 150

daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total APBD mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mendukung pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menuangkan kebijakan publiknya di daerah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan untuk belanja pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakkonsistenan peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus mengindikasikan bahwa pendapatan daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus belum optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum menjadi tugas pokok pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai ketika pemerintah daerah telah memberikan pelayanan umum yang

baik kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan dana yang memang ditunjuk untuk hal tersebut. Otonomi daerah sendiri tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait tentang pembangunan saja, akan tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian pendapatan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah, juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, termasuk dana yang akan digunakan dalam aktivitas pendanaan layanan publik bagi masyarakat.

Amalia dan Purbadharmaja (2014) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi dan Sutrisna (2014) juga mengemukakan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Studi yang dilakukan oleh Suci (2013) terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengemukakan bahwa kemandirian fiskal mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Penelitian tersebut membuktikan peningkatan kemandirian fiskal sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundang-undangan terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

11.3 Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat

Dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas, dan sumber-sumber yang berkaitan (seperti: keuangan, karyawan, dll) dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah⁸¹.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, maka dengan adanya penyerahan wewenang tersebut dibentuk dan disusunlah pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonom. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai salah satu tujuan

⁸¹ Akhmad mulyana, *Sosiologi Komunikasi*, (pusat pengembangan bahan ajar UMB, 2006), hal 26

bernegara khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Pemanfaatan anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dapat digunakan untuk mendukung fungsi pelayanan publik sesuai dengan amanah yang dilimpahkan guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah mampu melakukan penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah, dapat mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah, selain itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, memberikan pelayanan publik di setiap daerah sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Peneliti sebelumnya seperti Bisma dan Susanto (2010)⁸², menjelaskan desentralisasi fiskal *cukup*, mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

⁸² Bisma, I.G & Susanto, H., *Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi.....*

Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut:

H_3 : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

11.4 Hubungan efektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat

Dijelaskan oleh Halim (2011)⁸³ yakni rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen Suyana Utama, (2008).

Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu dapat melaksanakan tugas penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diterima tidak dikelola dengan baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya

⁸³ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hal 255

bergantung pada nominal pendapatannya, namun juga tata cara pengelolaannya.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah daerah yang mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik. Sehingga dengan layanan publik yang baik akan tercapai kesejahteraan yang tinggi.

penelitian yang dilakukan oleh Azwar, dkk (2014)⁸⁴, efektivitas kinerja keuangan lokal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut:

H_4 : Efektifitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pemabangunan Manusia (IPM)

11.5 Hubungan efisiensi dan Kesejahteraan Masyarakat

Dijelaskan oleh Mahmudi (2011)⁸⁵, efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan.

⁸⁴ Azwar, & Subekan, A, *Kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan.....*

⁸⁵ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal 171

Menurut mulyadi (2007) mengemukakan bahwa : “efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio *input* dan *output* biaya dan keuntungan⁸⁶.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001) menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatangunaan, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pendapatan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Semakin efisien pendapatan yang digunakan untuk membiayai hal produktif maka akan menghasilkan output yang besar pula. Seperti halnya pembiayaan untuk belanja modal yang besar akan mendorong terjadinya pembangunan diberbagai sector guna mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pendapatan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan

⁸⁶ Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal, 63

daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Azwar, dkk (2014)⁸⁷, menjelaskan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial memiliki efek negative tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

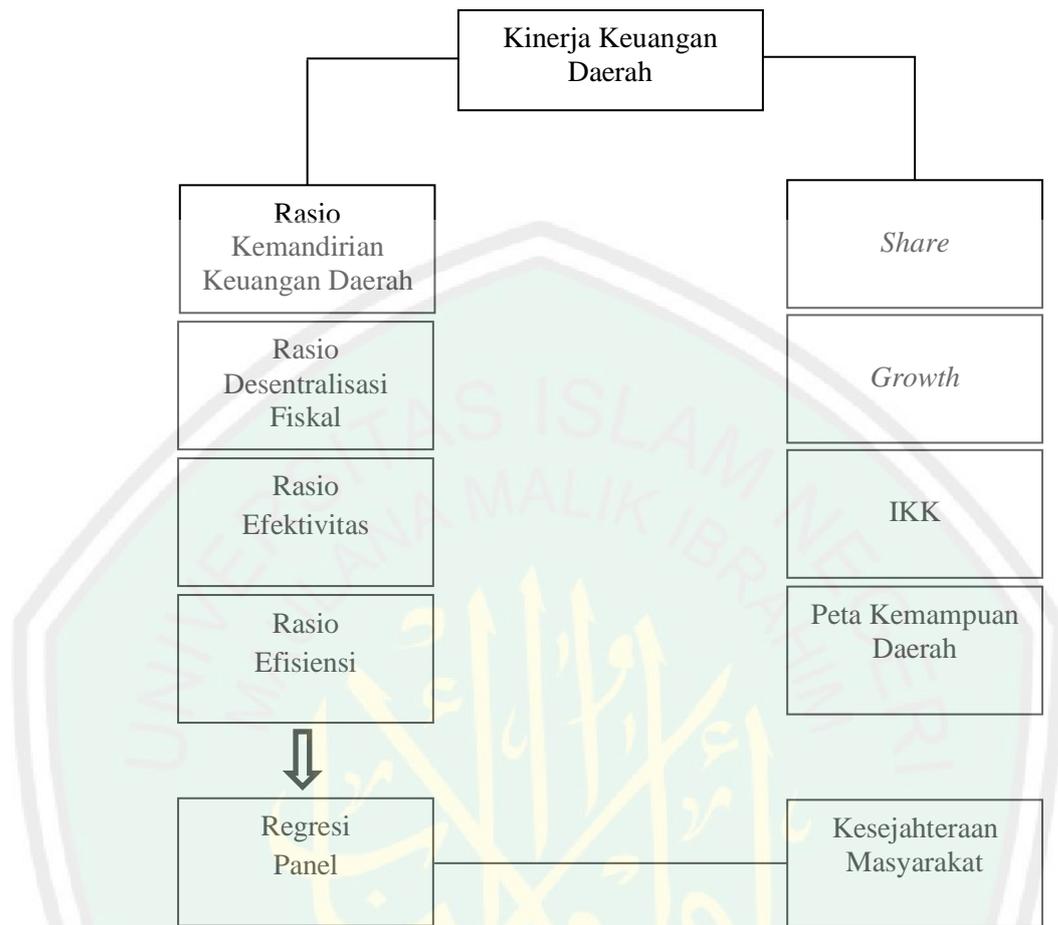
Oleh karena itu, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_5 : Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian mengacu pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis merumuskan kerangka pemikiran pada gambar berikut:

⁸⁷ Azwar, & Subekan, A, *kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan.....*



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari komponen kinerja keuangan di atas dapat dilakukan proses perhitungan analisis dengan menggunakan:
 - a. alat analisis rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
 - b. Share, growth, IKK, dan selanjutnya dibuat peta kemampuan daerah
2. Hasil analisis rasio keuangan kemudian dianalisa menggunakan regresi panel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur. Pemilihan Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai daerah otonom, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur selama enam tahun anggaran sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik atau sebaliknya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif murni yaitu penelitian yang memaparkan secara murni objek yang diamati kemudian dikelompokkan pada klasifikasi tertentu dan kemudian diambil kesimpulan.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari laporan tahunan Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupa data

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data diperoleh dari instansi terkait, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD-Jatim).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang merupakan pengumpulan data tertulis atau dokumen yang sudah ada melalui instansi terkait, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD) berupa data realisasi APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif murni yaitu penelitian yang memaparkan secara murni objek yang diamati kemudian dikelompokkan pada klasifikasi tertentu dan kemudian diambil kesimpulan.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah dan pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Rasio Keuangan

a. Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman⁸⁸. Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah analisis rasio kemandirian keuangan daerah (KKD).

Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Namun, pada penelitian ini tidak digunakan pinjaman karena pada Laporan Realisasi Anggaran ditunjukkan pada tahun anggaran 2012 dan 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memperoleh penerimaan pinjaman daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim⁸⁹

b. Desentralisasi Fiskal

Pengukuran tingkat desentralisasi fiskal ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan⁹⁰. Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat desentralisasi fiskal adalah analisis rasio desentralisasi fiskal.

⁸⁸ Abdul Halim, *Manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001), Hal 127

⁸⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor publik; Akuntansi keuangan daerah edisi pertama*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal 232

⁹⁰ Ibid, Hal 127

Analisis tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi⁹¹

c. Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan⁹². Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas adalah analisis rasio efektivitas.

Analisis tingkat efektivitas diukur dengan menggunakan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD dikalikan 100%. Kemampuan keuangan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan keuangan daerah pun semakin baik. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efektivitas.

⁹¹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), Hal 128

⁹² Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII press, 2011), Hal 171

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim⁹³

d. Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan⁹⁴. Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi adalah analisis rasio efisiensi.

Analisis tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara besarnya pengeluaran belanja dengan realisasi pendapatan dikalikan 100 persen.. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai mencapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim⁹⁵

⁹³ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor publik; Akuntansi keuangan daerah edisi pertama*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal 234

⁹⁴ Abdul Halim, *Manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001), Hal 127

⁹⁵ Ibid, Hal 234

2. Kemampuan Keuangan Daerah

a. Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth*

Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan *Growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun $i-1$. Rasio ini digunakan untuk melihat pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun⁹⁶.

Analisis kemampuan keuangan daerah; *pertama*, diawali dengan Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth*. Adapun formula untuk perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i - \text{PAD}_{i-1}}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

$\text{PAD}_i - 1$ = Pendapatan Asli Daerah periode $i-1$

⁹⁶ Bappenas, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, (Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah), hal 3

b. Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran dan Metode Indeks

Yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *share* dan *growth*. Dengan nilai *share* dan *growth* maka Provinsi Jawa Timur dapat diketahui berada pada posisi kuadran berapa⁹⁷.

Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan *growth*, indeks elastisitas, dan indeks *share*⁹⁸. Tujuan dari analisis kemampuan keuangan dengan menggunakan metode indeks ini adalah untuk melihat tingkat kemampuan keuangan Provinsi Jawa Timur.

Kedua, dengan menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rerata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), Indeks Elastisitas dan Indeks *Share*. Untuk menyusun ketiga komponen indeks tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum:

$$\text{Indeks X} = \frac{((\text{Nilai X}_{\text{Hasil Pengukuran}}) - (\text{Nilai X}_{\text{Kondisi Minimum}}))}{((\text{Nilai X}_{\text{Kondisi Maksimum}}) - (\text{Nilai X}_{\text{Kondisi Minimum}}))}$$

⁹⁷ Ibid, Hal 3

⁹⁸ Ibid, Hal 4

Berdasarkan persamaan di atas maka persamaan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dapat ditulis sebagai berikut:

$$IKK = \frac{(XG + XE + XS)}{3}$$

Sumber: Bappenas⁹⁹

Keterangan:

XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)

XE = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung terhadap PAD)

XS = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran (lihat tabel 2.5).

3. Analisis Regresi

Untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi terhadap kesejahteraan ekonomi di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. Dalam penelitian ini digunakan regresi data panel, untuk mengetahui apakah kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi terhadap kesejahteraan ekonomi. Data panel sendiri merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtun waktu biasanya meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode (harian, kuartalan, dan atau tahunan). Data runtun waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2017. Sedangkan, data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek yang sering disebut sebagai responden dengan beberapa jenis data dalam suatu periode waktu

⁹⁹ Bappenas, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, (Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah), hal 3-4

tertentu, dan data silang dalam penelitian ini adalah duabelas Kabupaten dan Kota di wilayah SWP Gerbangkertasusila Plus di Provinsi Jawa Timur.

Bentuk umum dari struktur persamaan model analisis regresi data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_i + \sum_{j=1}^n \beta_{jit} X_{jit} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

i : *unit cross section* sebanyak k

t : *unit time series* sebanyak t

Y_{it} : variabel dependen untuk *section* ke- i waktu ke- t

X_{jit} : variabel independen ke- j untuk *section* ke- i dan waktu ke- t

ϵ_{it} : *error term*

Dalam analisis data, ada kalanya penggunaan data *cross-sectional* dan *time-series* memiliki kelebihan dibandingkan dengan menggunakan data *cross-sectional* atau *time-series* saja. Baltagi dalam (Gujarati, 2003:637) menjelaskan ada beberapa keuntungan yang diperoleh apabila kita menggunakan data panel, diantaranya adalah :

1. Dengan mengkombinasikan data *time-series* dengan data *cross-section* (data panel maka dapat memberikan data yang lebih informative, lebih variatif, dan dapat mengurangi kolinearitas antar variabel.
2. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dalam mengukur efek-efek yang tidak dapat diobservasi dalam *cross-sectional* maupun data *time-series* murni.

3. Data panel memungkinkan untuk dipelajarinya model perilaku yang lebih rumit, sebagai contoh adalah adanya fenomena seperti *economies of scale* dan perubahan teknologi yang dapat dilakukan lebih baik dengan data panel daripada *cross-sectionnal* dan ataupun *time-series* murni.

3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi dari variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X1) dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah. Dimana kemandirian keuangan daerah adalah sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Tingkat Kemandirian Keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman¹⁰⁰.
2. Variabel Independen (X2) dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan.
3. Variabel independen (X3) dalam penelitian ini adalah efektifitas. Efektifitas adalah kemampuan PEMDA dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

¹⁰⁰ Abdul halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba empat, 2012), hal 128

ditetapkan. Selain itu efektifitas juga digunakan untuk menunjukkan tingkat efektivitas dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya.

4. Variabel independen (X4) dalam penelitian ini adalah efisiensi. Efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan¹⁰¹.
5. Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasi kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰² Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ini digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau lebih dikenal dengan istilah *Human Development Index* (HDI). Berkaitan dengan IPM ini pada tahun 1990 UNDP dibawah bendera PBB memperkenalkan tiga indikator penting yaitu peluang

¹⁰¹ Ibid, Hal 171

¹⁰² Ibid., Hal 84-86.

hidup (*Longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Tiga indikator ini dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.

F. Membandingkan dengan Standar Rasio Keuangan dan Kesejahteraan masyarakat

Setelah melakukan pengukuran terhadap rasio keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan, langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil perhitungan analisis dengan standar yang telah ditetapkan dan mengukur pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat

G. Interpretasi

Setelah melakukan perhitungan analisis dan kemudian membandingkan hasil analisis dengan standar yang telah ditetapkan, langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil analisis yang telah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dan interpretasi hasil pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Perekonomian di SWP Gerbangkertasusila Plus

Pada dasarnya, berkembang atau tidaknya suatu daerah dapat dilihat atau diketahui dari perkembangan laju pertumbuhan ekonominya. Angka pertumbuhan ekonomi sendiri, diperoleh dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah berdasarkan harga konstan. Sehingga, diharapkan dinamika dari kegiatan perekonomian yang terjadi secara nyata berasal dari adanya penambahan jumlah barang dan jasa produksi. Sehingga, semakin tinggi jumlah barang dan atau jasa yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi pula sisi permintaan barang dan atau jasa dari para konsumen. Dengan begitu, hal semacam ini akan menunjukkan bahwa di kawasan tersebut telah terjadi pertumbuhan ekonomi.



Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB SWP Gerbangkertasusila Plus (2012-2017) (%)

Sumber :BPS Jatim, data diolah (2018)

Pertumbuhan ekonomi di kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur saat ini masih kurang stabil. Berdasarkan Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut pada kurun waktu tahun 2012-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Pada tahun 2013 terjadi penurunan laju

pertumbuhan ekonomi dari 5,87% menjadi 5,67%. Namun pada tahun berikutnya juga mengalami fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di kawasan ini cukup tinggi, yaitu sebesar 6,49%. Hal ini dikarenakan karena, investasi yang masuk di kawasan ini semakin meningkat serta adanya tingkat konsumsi masyarakat di wilayah ini juga ikut mengalami peningkatan.

Pada dasarnya, masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah SWP Gerbangkertasusila Plus ini berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Namun, dikarenakan adanya perbedaan kondisi geografis, sumber daya dan sosial budaya yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda, maka hal ini menjadi penyebab utama adanya perbedaan hasil PDRB di setiap wilayah. Misalnya saja, pada tahun 2017 terlihat bahwa, pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di SWP Gerbangkertasusila Plus mengalami perlambatan ekonomi yang tampak di hampir semua wilayah. Hal ini disebabkan karena menurunnya kinerja ekspor dan konsumsi pemerintah. Sehingga hal semacam ini menahan ekonomi di wilayah ini untuk tumbuh lebih tinggi. Bahkan, perlambatan ekspor luar negeri di Jawa terjadi di seluruh komoditas. Meskipun ada secara keseluruhan Kabupaten dan Kota di wilayah ini mengalami perlambatan ekonomi, akan tetapi Kabupaten Bojonegoro mampu membuktikan kalau Kabupaten ini mampu untuk meningkatkan pertumbuhannya, dimana pertumbuhan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 sebesar 10,26%, pertumbuhan hal ini lebih kecil dari tahun sebelumnya, tetapi lebih besar dari Kabupaten dan Kota lainnya. Tingginya nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro ini disebabkan karena Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan sumber daya minyak dan gas yang

berlimpah di daerahnya.. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terendah berada di Kabupaten Bangkalan sebesar 3.53%. Rendahnya nilai pertumbuhan ini disebabkan karena, Kabupaten Bangkalan belum menggarap keunggulan kompetitif tersebut secara maksimal.

Pada dasarnya, tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan adalah dapat dilihat dari aspek tinggi dan rendahnya suatu perekonomian di suatu daerah, tidak hanya dilihat pada sisi perkembangan nilai PDRB, tetapi juga dilihat dari sisi perkembangan tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita. Badan Pusat Statistika (2017), menyatakan bahwa, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui bagaimana nyatanya pertumbuhan ekonomi per kapita untuk setiap penduduk di setiap Negara. Sehingga, kesejahteraan penduduk dapat diukur dari tinggi dan rendahnya nilai PDRB per kapita di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB per kapita di kawasan Gerbangkertasusila Plus diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita di kawasan Gerbangkertasusila Plus selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Peningkatan nilai PDRB per kapita menunjukkan bahwa, wilayah tersebut memiliki tingkat perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah yang cukup baik.

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 nilai PDRB per kapita di kawasan Gerbangkertasusila Plus terlihat cukup baik, sehingga hal ini mengidentifikasi bahwa, perekonomian di setiap wilayah pada objek penelitian memiliki tingkat pertumbuhan yang juga cukup baik. Pada Tabel 4.1 bahwa, pada tahun 2017 PDRB Per Kapita tertinggi berada di Kota Surabaya yaitu sebesar Rp.

120.871 diikuti oleh Kabupaten Gresik sebesar Rp. 70.705, sedangkan wilayah yang memiliki nilai PDRB terendah adalah Kabupaten Bangkalan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 18.147.

Tabel 4.1 PDRB Perkapita Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Tahun 2012-2017 (Ribuan Rupiah)

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	17.428	17.284	18.365	17.717	17.676	18.147
2	31.180	31.799	32.404	37.921	46.104	50.693
3	55.500	58.116	61.482	64.778	67.561	70.705
4	15.991	16.750	17.654	18.501	19.401	20.347
5	15.670	16.730	17.774	18.788	19.882	20.974
6	37.192	39.335	41.375	43.310	45.281	47.470
7	45.453	48.207	51.039	53.367	55.852	58.620
8	46.378	48.801	51.075	52.904	54.954	57.260
9	28.042	29.504	30.965	32.315	33.738	35.268
10	27.395	28.810	30.270	31.753	33.401	35.039
11	21.301	22.440	23.597	24.709	25.578	27.082
12	94.768	101.368	107.960	113.816	120.058	120.871
13	436.299	459.143	483.959	509.879	539.486	562.474

Sumber : BPS Jawa Timur, data Diolah (2018)

Dimana:

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Kb. Bangkalan | 6. Kb. Mojokerto | 11. Kt. Pasuruan |
| 2. Kb. Bojonegoro | 7. Kb. Pasuruan | 12. Kt. Surabaya |
| 3. Kb. Gresik | 8. Kb. Sidoarjo | 13. GerbangKertasusila Plus |
| 4. Kb. Jombang | 9. Kb. Tuban | |
| 5. Kb. Lamongan | 10. Kt. Mojokerto | |

Kota Surabaya merupakan pusat dari kegiatan perekonomian di kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus. Pada dasarnya Kota Surabaya memberikan kontribusi sebesar 21.98% terhadap PDRB per kapita dari 11 Kabupaten dan Kota lainnya. Kota Surabaya juga memiliki peran sebagai pintu masuk utama dalam kegiatan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur, sehingga wilayah ini sangat mendominasi kegiatan perekonomian di SWP Gerbangkertasusila Plus. Dengan berbagai aspek yang dimiliki di Kota Surabaya, hal ini menjadikan Kota

Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, serta memiliki jumlah penduduk tertinggi di kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus. Sedangkan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan menjadi penyumbang tertinggi. Hal ini disebabkan karena, Kabupaten dan Kota tersebut merupakan Kabupaten dan Kota dengan julukan Kota Industri. Karena, di wilayah tersebut banyak industri baik kecil maupun besar berdiri di wilayah tersebut. Dengan berlangsungnya kegiatan industri di wilayah tersebut maka secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan perekonomian di kawasan tersebut. Selain karena mereka adalah Kabupaten dan Kota yang memiliki julukan Kota Industry, Kabupaten dan Kota tersebut berada di wilayah segitiga emas di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan, letak geografis Kabupaten dan Kota tersebut cukup berdekatan sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan perekonomian antar daerah, selain itu Kabupaten dan Kota tersebut berdekatan dengan pelabuhan-pelabuhan di wilayahnya sehingga hal ini akan membuat semakin mudah untuk melakukan kegiatan ekspor-impor. Dengan adanya letak geografis yang cukup strategis maka memungkinkan para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

B. Hasil Analisis

1. Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus Provinsi Jawa Timur pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus Provinsi Jawa Timur dalam mengelola keuangan daerahnya di masa lalu. Dalam

penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus Provinsi Jawa Timur diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah, dan dari analisis tersebut penulis melihat standar penilaian yang telah ditetapkan. Adapun hasil dari analisis rasio keuangan daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus di Provinsi Jawa Timur dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus Provinsi Jawa Timur diukur melalui perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 (PAD Terhadap Dana Perimbangan)
 Kota dan Kabupaten SWP Gerbangkertasusila Plus
 Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

Kab/Kota	Kemandirian Daerah tanpa log						Rata-rata	Evaluasi
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Kb. Bangkalan	9,00	7,29	9,89	14,82	14,77	13,29	11,51	Kurang
Kb. Bojonegoro	11,07	11,12	13,64	17,25	17,07	17,32	14,58	Kurang
Kb. Gresik	45,12	40,63	47,19	72,46	53,53	46,23	50,86	Sangat Baik
Kb. Jombang	16,48	14,38	19,70	31,09	25,29	27,06	22,33	Sedang
Kb. Lamongan	12,84	11,57	16,98	24,48	23,61	28,52	19,67	Kurang
Kb. Mojokerto	18,53	14,59	25,72	38,45	34,03	30,23	26,92	Sedang
Kb. Pasuruan	17,91	17,35	24,06	34,39	26,25	27,42	24,56	Sedang
Kb. Sidoarjo	55,71	52,86	53,01	91,23	79,01	70,61	67,07	Sangat Baik
Kb. Tuban	20,33	18,36	19,41	30,32	25,22	25,02	23,11	Sedang
Kt. Mojokerto	14,08	14,62	18,13	28,26	27,42	32,41	22,49	Sedang
Kt. Pasuruan	10,86	12,19	16,75	23,72	25,67	24,71	18,98	Kurang
Kt. Surabaya	159,07	155,78	121,53	291,43	210,72	184,99	187,25	Sangat Baik

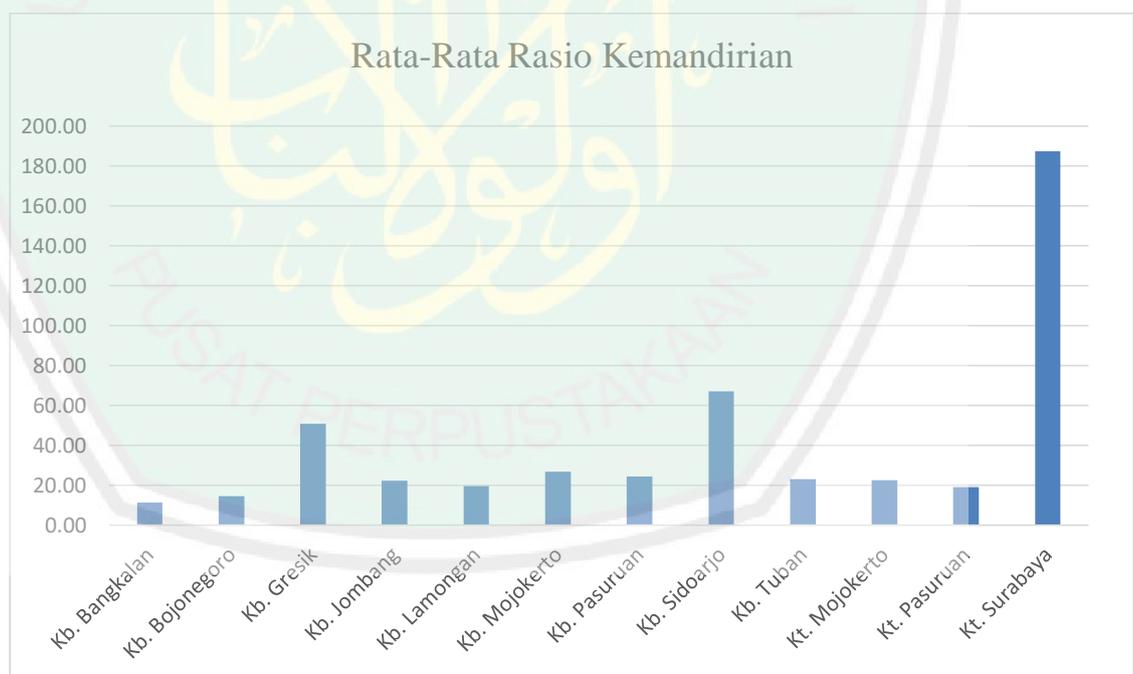
Sumber : Data APBD Jawa Timur diolah

Sumber Standar : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada Tabel 4.2 di atas, tingkat kemandirian keuangan Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus di Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 terlihat bahwa Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, dan Kota Pasuruan berada pada kategori *kurang* dengan rata-rata rasio kemandirian dibawah angka 20. Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kota Mojokerto berada pada kategori *sedang* dengan rata-rata rasio kemandirian dikisaran 20-30. Ini menunjukkan bahwa, peranan pemerintah pusat di wilayah Kabupaten dan Kota

ini lebih dominan daripada tingkat kemandiriannya. Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, dan Kota Surabaya berada pada kategori *sangat baik* dengan nilai rasio kemandirian daerah diatas angka 50. Pola hubungan yang sangat baik menunjukkan bahwa, peranan pemerintah pusat di wilayah Kabupaten dan Kota tersebut sudah semakin berkurang. Ini artinya ketiga Kabupaten dan Kota tersebut sudah mampu untuk mengembakan potensi daerah yang ada.

Hasil perhitungan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah disajikan pada Gambar 4.2 untuk mempermudah pengamatan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2012-2017 sebagai berikut :



Gambar 4.2
Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus
Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten dan Kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2012-2017 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal
(PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah)
Kota dan Kabupaten SWP Gerbangkertasusila Plus
Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

Kab/Kota	Desentralisasi fiskal Daerah tanpa log						Rata-rata	Evaluasi
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Kb. Bangkalan	7,64	5,97	8,26	9,82	10,92	9,46	8,68	Sangat Kurang
Kb. Bojonegoro	10,19	9,01	11,57	11,65	11,33	11,64	10,90	Kurang
Kb. Gresik	31,02	26,05	31,75	32,83	28,37	25,06	29,18	Sedang
Kb. Jombang	13,76	11,00	15,95	16,92	16,58	16,24	15,08	Kurang
Kb. Lamongan	9,15	8,63	13,83	13,20	14,84	17,49	12,86	Kurang
Kb. Mojokerto	14,13	11,39	18,89	19,59	20,62	18,79	17,24	Kurang
Kb. Pasuruan	13,08	13,42	19,09	18,99	17,04	17,77	16,56	Kurang
Kb. Sidoarjo	34,05	29,85	34,07	35,62	36,40	34,35	34,06	Cukup
Kb. Tuban	15,81	13,77	15,96	17,15	16,68	16,32	15,95	Kurang
Kt. Mojokerto	14,80	11,71	15,27	18,01	18,90	22,05	16,79	Kurang
Kt. Pasuruan	9,67	9,97	14,35	15,53	18,73	17,44	14,28	Kurang
Kt. Surabaya	66,78	51,49	54,64	60,97	59,91	57,46	58,54	Sangat Baik

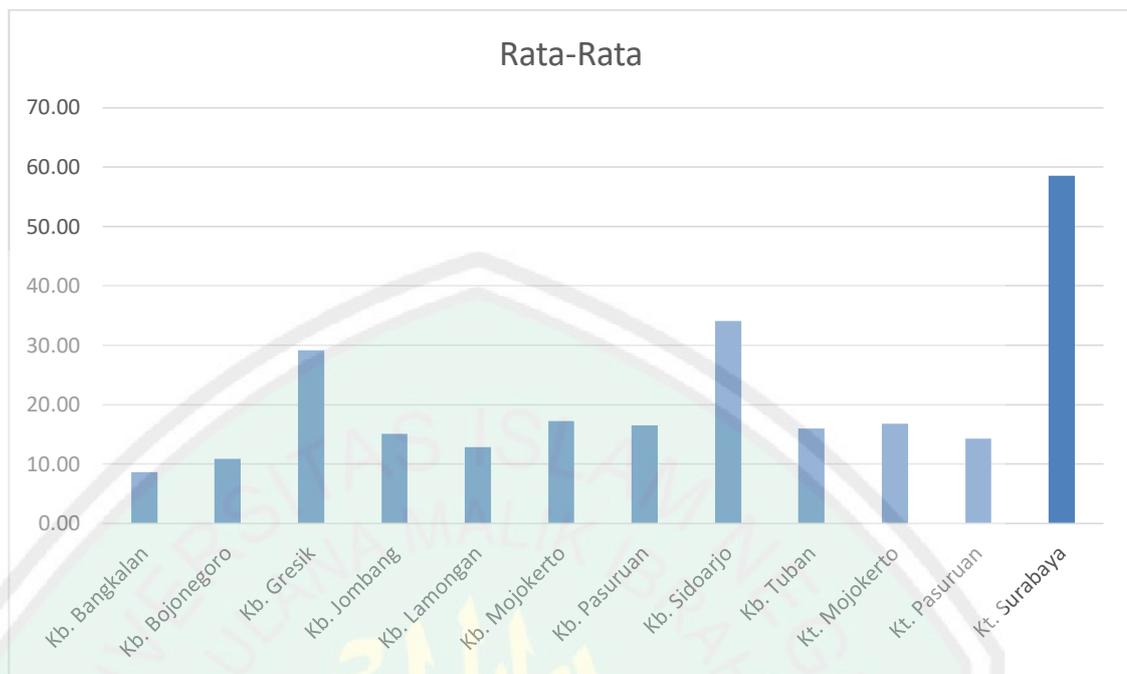
Sumber : Data APBD Jawa Timur diolah

Sumber Standar :Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Berdasarkan hasil analisis rasio desentralisasi fiskal pada Tabel 4.3 di atas, rasio desentralisasi fiskal kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 terlihat bahwa Kab. Bangkalan

pada kategori *kurang baik*. Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kt. Mojokerto dan Kota Pasuruan berada pada kategori *kurang* dengan rata-rata rasio Desentralisasi fiskal antara angka 10.01-20.00. Kab. Gresik berada pada kategori sedang, sedangkan Kab. Sidoarjo berada pada kategori *Cukup* dengan rata-rata rasio desentralisasi fiskal antara 30.01-40.00. Kt. Surabaya yang hanya berada pada kategori *sangat baik* dengan rata-rata rasio desentralisasi fiskal diatas 50. Hal ini disebabkan karena rata-rata rasio desentralisasi fiskal melebihi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian berarti peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi perolehan PAD sangat baik yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri mencapai lebih dari 50%.

Hasil perhitungan rata-rata rasio desentralisasi fiskal disajikan pada Gambar 4.3 untuk mempermudah pengamatan terhadap tingkat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2012-2017 sebagai berikut :



Gambar 4.3
Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah
Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus
Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

c. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efektivitas.

Pengukuran tingkat efektivitas pendapatan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 diketahui melalui rasio antara realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran. Adapun hasil analisis rasio efektivitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

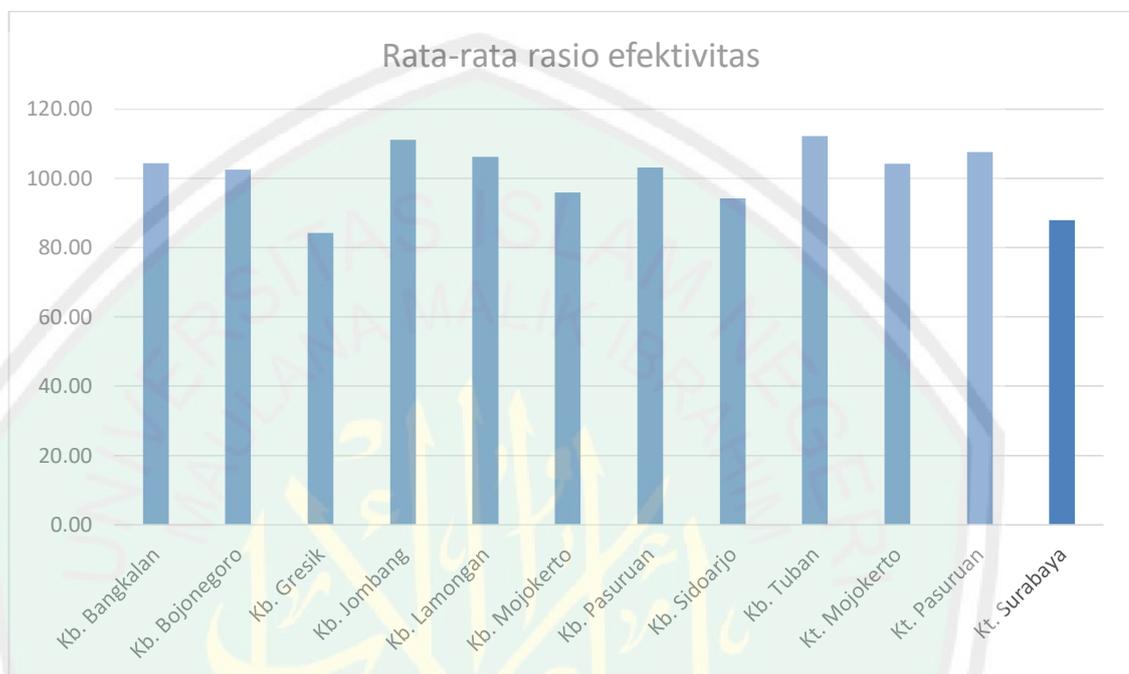
Tabel 4.4
 Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Efektivitas
 (Realisasi Pendapatan Terhadap Target Pendapatan)
 Kota dan Kabupaten SWP Gerbangkertasusila Plus
 Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

Kab/Kota	Efektivitas Daerah tanpa log						Rata-rata	Evaluasi
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Kb. Bangkalan	127,74	47,62	134,29	143,86	120,54	51,95	104,33	Sangat Efektif
Kb. Bojonegoro	117,36	48,62	148,55	128,43	117,03	55,29	102,55	Sangat Efektif
Kb. Gresik	131,44	54,76	110,07	94,98	77,35	36,38	84,16	Cukup Efektif
Kb. Jombang	139,90	59,23	147,78	142,10	120,88	56,31	111,03	Sangat Efektif
Kb. Lamongan	119,04	58,05	152,28	120,58	127,23	59,85	106,17	Sangat Efektif
Kb. Mojokerto	153,89	41,41	118,19	103,74	108,18	50,24	95,94	Efektif
Kb. Pasuruan	128,19	60,37	142,03	128,41	106,26	53,05	103,05	Sangat Efektif
Kb. Sidoarjo	112,02	53,56	121,27	116,16	110,92	51,56	94,25	Efektif
Kb. Tuban	160,55	55,89	141,87	132,58	121,22	60,71	112,14	Sangat Efektif
Kt. Mojokerto	111,20	57,01	143,74	139,22	124,93	48,77	104,15	Sangat Efektif
Kt. Pasuruan	127,58	56,14	145,38	123,73	133,32	58,93	107,51	Sangat Efektif
Kt. Surabaya	96,87	50,76	111,96	114,64	106,54	46,56	87,89	Cukup Efektif

*Sumber : Data APBD Jawa Timur diolah
 Sumber Standar : Mahmudi (2011)*

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada Tabel 4.4 di atas, rasio efektivitas kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 terlihat bahwa Kab. Gresik dan Kt. Surabaya berada pada kategori *cukup efektif* dengan rata-rata rasio efektivitas antara 80-90 . Kab. Mojokerto, dan Kab. Sidoarjo berada pada kategori *efektif* dengan rata-rata rasio efektivitas antara 90-100. Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kt. Mojokerto dan Kt Pasuruan berada pada *sangat efektif* dengan rata-rata rasio efektivitas diatas 100. Melebihi standar yang telah ditetapkan, dan penyebab tingkat efektivitas melebihi standar karena realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas disajikan pada Gambar 4.4 untuk mempermudah pengamatan terhadap tingkat efektivitas kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2012-2017 sebagai berikut :



Gambar 4.4
Rata-Rata Rasio Efektivitas Daerah
Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasila Plus
Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

d. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan.

Pengukuran tingkat efisiensi kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur periode anggaran 2012-2017 dapat diketahui melalui perbandingan antara pengeluaran belanja dengan pendapatan daerah. Adapun hasil analisis rasio efisiensi dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
 Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Efisiensi
 (Pengeluaran Belanja Terhadap Pendapatan)
 Kota dan Kabupaten SWP Gerbangkertasusila
 Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

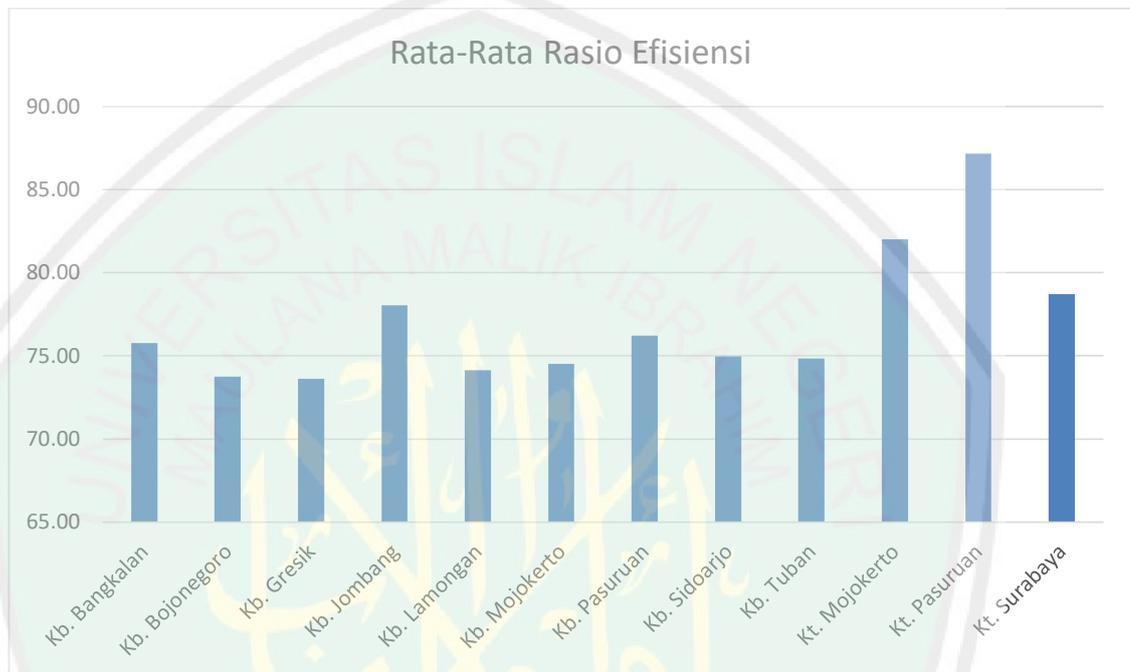
Kab/Kota	Efisiensi Daerah tanpa log						Rata-rata	Evaluasi
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Kb. Bangkalan	116,20	62,14	9,52	102,83	106,17	57,66	75,75	Efisien
Kb. Bojonegoro	108,36	49,61	9,59	98,13	108,01	68,86	73,76	Efisien
Kb. Gresik	105,27	56,69	9,84	103,82	101,20	64,95	73,63	Efisien
Kb. Jombang	114,15	72,13	8,95	100,64	104,76	67,57	78,03	Efisien
Kb. Lamongan	104,29	57,72	9,70	98,82	102,83	71,38	74,12	Efisien
Kb. Mojokerto	107,45	56,21	8,96	102,90	104,08	67,40	74,50	Efisien
Kb. Pasuruan	104,99	62,94	8,82	97,03	112,00	71,47	76,21	Efisien
Kb. Sidoarjo	113,83	59,36	8,72	103,00	99,55	65,40	74,98	Efisien
Kb. Tuban	113,27	58,90	9,26	99,02	101,63	66,87	74,83	Efisien
Kt. Mojokerto	135,38	56,62	9,16	98,50	117,10	75,35	82,02	Cukup Efisien
Kt. Pasuruan	111,41	62,93	90,82	100,27	99,51	57,89	87,14	Cukup Efisien
Kt. Surabaya	125,93	57,28	9,43	98,06	104,78	76,78	78,71	Efisien

Sumber : Data APBD Jawa Timur diolah

Sumber Standar : Halim (2011)

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada Tabel 4.5 di atas, rasio efisiensi kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 terlihat bahwa Kt. Mojokerto dan Kt. Pasuruan berada pada kategori *cukup efisien* dengan rata-rata rasio efektivitas antara 80-90. Sedangkan Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban dan Kt. Surabaya berada pada kategori *efisien*. Penyebab tingkat efisiensi dinyatakan *Efisien* di 10 daerah tersebut karena pemerintah daerah membelanjakan lebih kecil dari kemampuan pendapatan sehingga mengakibatkan tingkat efisiensi pengeluaran belanja terhadap pendapatan memiliki kecenderungan *Efisien*.

Hasil perhitungan rasio efisiensi disajikan pada Gambar 4.5 untuk mempermudah pengamatan terhadap tingkat efisiensi Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2012-2017 sebagai berikut :



Gambar 4.5
Rata-Rata Rasio Efisiensi Daerah
Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus
Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Bisma dan Susanto (2010) mengatakan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Dari hasil analisis kemampuan keuangan daerah diperoleh rata-rata *share* sebesar 25,56% dan *growth* sebesar 33%. Apabila rata-rata *share* dan *growth* diperoleh nilai ≤ 1 maka dikatakan *rendah*, begitupun sebaliknya apabila rata-rata *share* dan *growth* diperoleh nilai ≥ 1 maka dikatakan *tinggi*. Kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, Provinsi Jawa Timur berada pada posisi Kuadran I, yaitu menunjukkan bahwa pada kuadran ini kondisi Provinsi Jawa Timur masih belum ideal, tapi daerah punya kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan (*share*) PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

a. Elastisitas

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.

Tabel 4.6
Elastisitas (Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan PDRB)

Kab/Kota	Elastiistas Daerah tanpa log					Rata-rata	kondisi max(%)	kondisi Min (%)	indeks
	2013	2014	2015	2016	2017				
Kb. Bangkalan	6125,77	3877,92	-831,51	-394,54	-2,77	1754,97	465,56	121,98	4,75
Kb. Bojonegoro	-2023,53	10811,13	93,68	4,72	-0,92	1777,02	465,56	121,98	4,82
Kb. Gresik	-971,74	3493,20	264,38	-196,83	-0,73	517,66	465,56	121,98	1,15
Kb. Jombang	-1014,20	4755,48	410,59	58,29	-2,37	841,56	465,56	121,98	2,09
Kb. Lamongan	-651,20	4432,49	316,96	445,79	-1,85	908,44	465,56	121,98	2,29
Kb. Mojokerto	-905,79	6832,68	340,76	168,27	-1,08	1286,97	465,56	121,98	3,39
Kb. Pasuruan	-633,91	4275,24	295,62	11,41	-0,77	789,52	465,56	121,98	1,94
Kb. Sidoarjo	-808,95	4045,00	379,20	151,00	-0,86	753,08	465,56	121,98	1,84
Kb. Tuban	-885,43	3652,49	432,50	120,45	-1,29	663,74	465,56	121,98	1,58
Kt. Mojokerto	-680,16	4019,49	464,94	366,42	-1,36	833,86	465,56	121,98	2,07
Kt. Pasuruan	-597,85	4833,13	297,01	611,91	-1,78	1028,48	465,56	121,98	2,64
Kt. Surabaya	-613,86	2359,29	405,99	24,92	-0,43	435,18	465,56	121,98	0,91
Rata-Rata	-305,07	4782,30	239,18	114,32	-1,35	965,87	465,56	121,98	2,46

Sumber : Data APBD Jawa Timur diolah 2018

$$\text{Indeks Elastisitas} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{2,46}{12} = 0,205$$

Dari analisis pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, diketahui bahwa elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 , yang artinya otonomi daerah mampu menjadikan Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur lebih kreatif dalam mengembangkan potensi ekonomi lokalnya. Hal ini juga menandakan bahwa pemberian otonomi menjadikan Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur lebih sensitif pada potensi lokal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur sendiri.

b. Pertumbuhan PAD (*Growth*)

Growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun $i-1$.

Tabel 4.7
Pertumbuhan PAD (*Growth*)

Kab/Kota	Growth Daerah tanpa log					Rata-rata	kondisi max(%)	kondisi Min (%)	indeks
	2013	2014	2015	2016	2017				
Kb. Bangkalan	-51%	243%	29%	14%	-50%	37%	55%	16%	53%
Kb. Bojonegoro	-40%	206%	16%	1%	-47%	27%	55%	16%	28%
Kb. Gresik	-46%	202%	14%	-11%	-52%	22%	55%	16%	14%
Kb. Jombang	-48%	257%	20%	3%	-48%	37%	55%	16%	52%
Kb. Lamongan	-44%	277%	18%	25%	-39%	47%	55%	16%	81%
Kb. Mojokerto	-52%	354%	16%	8%	-51%	55%	55%	16%	100%
Kb. Pasuruan	-38%	251%	13%	1%	-45%	36%	55%	16%	52%
Kb. Sidoarjo	-42%	188%	14%	5%	-49%	23%	55%	16%	18%
Kb. Tuban	-46%	181%	19%	5%	-45%	23%	55%	16%	16%
Kt. Mojokerto	-35%	204%	23%	18%	-48%	32%	55%	16%	41%
Kt. Pasuruan	-32%	249%	14%	29%	-48%	42%	55%	16%	67%
Kt. Surabaya	-43%	153%	22%	1%	-52%	16%	55%	16%	0%
Rata-Rata	-43%	230%	18%	8%	-48%	33%	55%	16%	43%

Sumber : Data APBD Jawa Timur diolah 2018

$$\text{Indeks PAD (Growth)} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{43}{12} = 3,58$$

Dari hasil perhitungan pertumbuhan PAD, diperoleh rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur adalah 43%.

c. Peran (*Share*)

Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat pula digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Tabel 4.8
Share (PAD terhadap Total Belanja)

Kab/Kota	Share Daerah tanpa log					Rata-rata	kondisi max(%)	kondisi Min (%)	indeks
	2013	2014	2015	2016	2017				
Kb. Bangkalan	9.60	8.68	9.55	10.29	16.41	10.91	68.41	10.91	0.00
Kb. Bojonegoro	18.17	12.06	11.87	10.49	16.90	13.90	68.41	10.91	0.05
Kb. Gresik	45.95	32.25	31.63	28.03	38.59	35.29	68.41	10.91	0.42
Kb. Jombang	15.25	17.82	16.81	15.82	24.03	17.95	68.41	10.91	0.12
Kb. Lamongan	14.95	14.25	13.36	14.43	24.51	16.30	68.41	10.91	0.09
Kb. Mojokerto	20.27	21.08	19.04	19.81	27.88	21.61	68.41	10.91	0.19
Kb. Pasuruan	21.32	21.64	19.57	15.21	24.86	20.52	68.41	10.91	0.17
Kb. Sidoarjo	50.28	39.09	34.59	36.57	52.52	42.61	68.41	10.91	0.55
Kb. Tuban	23.38	17.23	17.31	16.41	24.41	19.75	68.41	10.91	0.15
Kt. Mojokerto	20.67	16.66	18.29	16.14	29.26	20.20	68.41	10.91	0.16
Kt. Pasuruan	15.84	15.80	15.49	18.82	30.13	19.22	68.41	10.91	0.14
Kt. Surabaya	89.89	57.95	62.18	57.17	74.83	68.41	68.41	10.91	1.00
Rata-Rata	28.80	22.88	22.47	21.60	32.03	25.56	68.41	10.91	0.25

Sumber : Data APBD Jawa Timur diolah

$$\text{Indeks Share} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{0.25}{12} = 0,02$$

Kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD. Dari hasil analisis di atas, apabila nilai *share* ≥ 1 maka dikatakan *tinggi*, begitu pula sebaliknya apabila nilai *share* < 1 maka dikatakan *rendah*. Kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2017 sudah mampu dalam membiayai seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD. Rata-rata PAD terhadap Total Belanja selama enam tahun terakhir (2012-2017) adalah **25,56%**.

d. Peta Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan informasi elastisitas, *growth*, dan *share*, ditampilkan Peta Kinerja PAD sebagai gambaran umum kemampuan daerah. Peta kinerja PAD ditampilkan melalui metode Kuadran dan Indeks.

1) Metode Kuadran

Dari profil kemampuan keuangan dengan metode kuadran diketahui bahwa kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berada pada kuadran I dimana nilai rata-rata *share* 25,56% yang dapat dikategorikan *tinggi* karena memiliki rata-rata ≥ 1 , serta nilai rata-rata *growth* 43%. yang dapat dikategorikan *tinggi* karena memiliki rata-rata ≥ 1 . Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut:

		GROWTH (%)			
		KUADRAN II	KUADRAN I		
SHARE (%)			<i>Gerbangkertasusila Plus</i>		SHARE (%)
		KUADRAN IV	KUADRAN III		
		GROWTH (%)			

Gambar 4.6
Peta kemampuan Daerah
Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus
Provinsi Jawa Timur TA. 2012-2017

2) Metode Indeks

Berdasarkan analisis indeks elastisitas, *growth*, dan *share* di atas, maka dapat diperoleh hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Tabel 4.9, sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks	Perhitungan	Hasil Hitung (%)	Standar Kemampuan Keuangan	Status Kemampuan Keuangan
XE = 0,205	$0,205 + 3,58 + 0,02$	3,8	0,44 – 1,00	Tinggi
XG = 3,58	3			
XS = 0,02				

Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2012-2017 pada skala indeks 3.8 selanjutnya diklasifikasikan menurut Standar Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah, maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 adalah dengan kemampuan keuangan *Tinggi*.

e. Analisis Model Regresi

Untuk melakukan pengujian pengaruh kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Kota di SWP Gerbangkertasusila Plus maka digunakan analisis regresi panel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebenarnya kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh secara signifikan positif dan atau negative, ataupun memang tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat daerah di

Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. Model regresi ini nanti bertujuan untuk mengestimasi variabel kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi terhadap kesejahteraan Masyarakat daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus, yang mana model regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan :

Y : Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

a : konstanta

b : koefisien

X1 : kemandirian keuangan daerah

X2 : desentralisasi fiskal

X3 : Efektifitas

X4 : Efisiensi

1) Hasil estimasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *panel*, dimana data model ini merupakan data yang bersifat tahunan dan menggunakan banyak objek, yang dimulai dari tahun 2012-2017 dan 12 Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. Analisis model ini menggunakan bantuan *software Eviews 9*. Pada penelitian ini, menggunakan dua estimasi model, kedua estimasi model tersebut diantaranya adalah *Uji Chow* dan *Uji Hausman*.

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang untuk membandingkan metode *Common Effect* dengan metode *Fixed Effect* dengan melihat nilai

probabilitas *cross section F-statistic* dengan $\alpha=5\%$. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah sebagai berikut :

H_0 : Model *common effect* lebih baik dari model *fixed effect*.

H_1 : Model *fixed effect* lebih baik dari model *common effect*.

Tabel 4.10 Hasil Estimasi Model Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	55.536324	(4,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	73.474103	4	0.0000

Sumber : Eviews9, data diolah (2018)

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa perhitungan uji F yakni Prob. $0.0000 < 0.05$ yang merupakan taraf signifikansi $\alpha=0.05\%$. Maka, dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dalam penelitian ini model *Fixed Effect* yang dipilih.

b. Uji Hausman

Uji hasuman ini dilakukan untuk melihat model terbaik antara metode *fixed effect* dan *random effect*. Uji hausman ini didasarkan pada ide bahwa, *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* di dalam model *fixed effect* dan GLS adalah efisiesn sedangkan OLS adalah tidak efisien. Metode ini melihat hasilnya dari nilai probabilitas *cross-section random* dan dibandingkan dengan derajat kebebasan sebesar $\alpha=5\%$. Hipotesis yang digunakan dalam uji hasuman adalah sebagi berikut :

H_0 : Model *random effect* lebih baik dari model *fixed effect*.

H_1 : Model *fixed effect* lebih baik dari model *random effect*.

Tabel 4.11 Hasil Uji Estimasi Model Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	222.145296	4	0.0000

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa perhitungan *Cross-section random* yakni Prob. $0.0000 < 0.05$ yang merupakan taraf signifikansi $\alpha=0.05\%$. Maka, dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, dalam penelitian ini model *Fixed effect* yang dipilih.

Dari kedua estimasi model yang dilakukan, ternyata menunjukkan hasil bahwa model estimasi terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed effect*. Sehingga, hasil uji *Fixed effect* adalah sebagai berikut

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Panel *Fixed effect* Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KKD	-0.001378	0.000895	-1.539968	0.1385
DSF	0.303784	0.074439	4.081001	0.0005
EFEKTIVITAS	-0.017868	0.004811	-3.714171	0.0013
EFISIENSI	0.000217	0.004459	0.048770	0.9616
C	65.03527	1.120233	58.05514	0.0000

Sumber : Eview9, data diolah (2018)

Dari hasil estimasi pada Tabel 4.12 dapat disusun persamaan regresi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

$$Y = 65.03527 + -0.001378 X_1 + 0.303784 X_2 + -0.017868 X_3 + 0.000217 X_4 + e$$

Dari hasil persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan persamaan tersebut sebagai berikut :

a) Variabel Independen

Nilai 65.03527 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka kesejahteraan masyarakat sebesar 65.03527 %.

b) Variabel Kemandirian Keuangan Daerah

Koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan Daerah yang bernilai negatif sebesar -0.001378 yang menjelaskan bahwa, apabila terjadi peningkatan pada variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1 % maka, rata-rata variabel kesejahteraan akan mengalami penurunan sebesar 0.001378 %.

c) Variabel Desentralisasi Fiskal

Koefisien regresi variabel Desentralisasi Fiskal yang bernilai positif sebesar 0.303784 yang menjelaskan bahwa, apabila terjadi peningkatan pada variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 1 % maka, rata-rata variabel kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.303784 %.

d) Variabel Efektivitas

Koefisien regresi variabel Efektivitas yang bernilai negatif sebesar -0.017868 yang menjelaskan bahwa, apabila terjadi peningkatan pada

variabel Efektivitas sebesar 1 % maka, rata-rata variabel kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan sebesar 0.017868 %.

e) Variabel Efisiensi

Koefisien regresi variabel Efisiensi yang bernilai positif sebesar 0.000217 yang menjelaskan bahwa, apabila terjadi peningkatan pada variabel Efisiensi sebesar 1 % maka, rata-rata variabel kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.000217 %.

2) Hasil Uji statistik

Adanya pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara nyata antara hubungan variabel independent terhadap variabel dependent. Pengujian hipotesis ini menggunakan tiga pengujian, yaitu pengujian secara simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji t), dan koefisien determinasi (R^2) Hasil pengujian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini sendiri bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan (serentak) antara seluruh variabel independent terhadap variabel dependen. Dimana hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara X1, X2, X3 dan X4 secara bersama-sama terhadap Y.

H_a : Terdapat pengaruh antara X1, X2, X3 dan X4 secara bersama-sama terhadap Y.

Dimana kriteria pengambilan keputusan dari hipotesa ini adalah :

H_0 diterima bila nilai $\text{sig} > \alpha$ dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

H_0 ditolak bila nilai $\text{sig} < \alpha$ dengan kata lain terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel depend.

Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan

Cross-section fixed (dummy variabels)			
R-squared	0.972190	Mean dependent var	67.81133
Adjusted R-squared	0.961595	S.D. dependent var	4.348145
S.E. of regression	0.852111	Akaike info criterion	2.761124
Sum squared resid	15.24794	Schwarz criterion	3.181483
Log likelihood	-32.41686	Hannan-Quinn criter.	2.895601
F-statistic	91.76460	Durbin-Watson stat	0.922091
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Eview9, data diolah (2018)

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai (F-statistic) adalah sebesar 0.000000. Dimana nilai F-statistic ini kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.000000 < 0.05$) sehingga hasil dari uji F ini adalah, variabel independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen atau dengan kata lain, variabel kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

b. Uji Signifikan Parsial atau Individual (Uji t)

Uji signifikansi atau individual digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Nyata atau tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat juga bergantung pada hubungan variabel tersebut. Jadi, Uji-t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel

bebas (Kemandirian Keuangan Daerah, Desentralisasi fiskal, Efektivitas, dan Efisiensi) terhadap variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat). Dimana hipotesisnya adalah :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara parsial terhadap Y .

H_a : Terdapat pengaruh antara X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara parsial terhadap Y .

Sehingga, pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut :

H_0 diterima bila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen.

H_0 ditolak bila nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ atau dengan kata lain terdapat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen.

Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial atau Individual (Uji-t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KKD	-0.001378	0.000895	-1.539968	0.1385
DSF	0.303784	0.074439	4.081001	0.0005
EFEKTIVITAS	-0.017868	0.004811	-3.714171	0.0013
EFISIENSI	0.000217	0.004459	0.048770	0.9616
C	65.03527	1.120233	58.05514	0.0000

Sumber : Eview9, data diolah (2018)

Pada table 4.14 nilai probabilitas untuk variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 0.1385 maka H_2 ditolak, yang berarti bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel desentralisasi fiskal dengan kesejahteraan masyarakat diperoleh probabilitas = 0,0005, maka H3 diterima, yang berarti desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. variabel efektivitas dengan kesejahteraan masyarakat diperoleh probabilitas =0.0013 maka H4 diterima, yang berarti efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. variabel efisiensi dengan kesejahteraan masyarakat diperoleh probabilitas = 0.9616 maka H5 ditolak, yang berarti efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh tidak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Koefisien Determinasi

Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variabel Y. analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independent secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dari penelitian ini adalah sebesar 0.972190 atau setara dengan 97.21%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yang terdiri dari Kemandirian Keuangan Daerah, Desentralisasi fiskal, Efektivitas, dan Efisiensi mampu untuk menjelaskan variabel terikat yaitu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar 2.79% dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Keuangan

Hasil analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rasio Keamandirian Keuangan Daerah

Peningkatan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur mayoritas masih bergantung oleh dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Terbukti dari 12 kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur hanya 3 daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah berada posisi *sangat baik..* daerah tersebut yakni Kb. Gresik, Kb. Sidoarjo, dan Kt. Surabaya. Hal ini dikarenakan penerimaan dari potensi sumber-sumber pendapatan daerah lebih besar dibandingkan penerimaan sumbangan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Ketiga kabupaten itu sudah mampu mengembangkan potensi daerah yang ada. Sejalan dengan apa disampaikan oleh World

Bank (1994) dalam Suhab (1997) menjelaskan bahwa, kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa memiliki ketergantungan dari pemerintah pusat maupun pihak eksternal. Selain itu juga menurut Suyana Utama (2008), rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan oleh Halim (2001), ketiga daerah Kab/kota tersebut berada pada pola Delegatif, pola yang terakhir ini menjelaskan bahwa, peranan pemerintah pusat sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan, daerah sudah mampu menggali potensi-potensi daerah yang ada. Sehingga, pola ini menunjukkan bahwa, daerah sudah benar-benar terbebas dari bantuan pusat maupun pihak eksternal.

Sementara itu ada empat daerah kab/kota yang lain berada posisi tingkat kemandirian keuangan daerah *kurang* yakni Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, dan Kota Pasuruan. Sedangkan Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kota Mojokerto berada pada kategori *sedang*. Hal ini menunjukkan ke Sembilan daerah tersebut masuk pada pola hubungan Konsultif dimana menurut Paul Hersey dan Kenneth Blachard dalam Halim (2001), pola ini menjelaskan bagaimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai sedikit

berkurang. Hal ini dikarenakan karena, pemerintah daerah sudah sedikit mampu dalam melaksanakan dan menerapkan kebijakan otonomi daerah.

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur periode anggaran 2012-2017 adalah terlihat bahwa Kt. Surabaya yang hanya berada pada kategori *sangat baik* dengan rata-rata rasio desentralisasi fiskal diatas 50. Hal ini disebabkan karena rata-rata rasio desentralisasi fiskal melebihi standar yang telah ditetapkan. Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi perolehan PAD sangat baik yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri mencapai lebih dari 50%. Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi perolehan PAD sangat baik yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri mencapai lebih dari 50%. Sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai salah satu tujuan bernegara

khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Demikian pula yang dijelaskan oleh Macfud Sidik (2001), desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Sedangkan ke sepuluh kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur belum bisa melaksanakan fungsi atau tugas pemerintahan secara efektif anggaran yang diberikan dari pusat. Yang sejatinya desentralisasi fiskal seperti disampaikan oleh Robert Simanjuntak (2002) sasaran desentralisasi fiskal seharusnya adalah:

- a. Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah.
- b. Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- d. Mengurangi ketimpangan antar daerah.
- e. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 terlihat bahwa Kab.

Gresik dan Kt. Surabaya berada pada kategori *cukup efektif*. Kab. Mojokerto, dan Kab. Sidoarjo berada pada kategori *efektif*. Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kt. Mojokerto dan Kt Pasuruan berada pada *sangat efektif*. Secara umum kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur telah mampu untuk merealisasikan pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah seperti yang disampaikan oleh Halim (2002). Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Suyana Utama (2008), yakni efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Rasio Efisiensi

rasio efisiensi kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 menunjukkan, bahwa Kt. Mojokerto dan Kt. Pasuruan berada pada kategori *cukup efisien*. Sedangkan Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban dan Kt. Surabaya berada pada kategori *efisien*. Penyebab tingkat efisiensi dinyatakan *Efisien* di 10 daerah tersebut karena pemerintah daerah membelanjakan lebih kecil dari kemampuan pendapatan sehingga

mengakibatkan tingkat efisiensi pengeluaran belanja terhadap pendapatan memiliki kecenderungan *Efisien*.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan kamus besar ekonomi (2003) menyatakan bahwa efisiensi adalah : “Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (*output*) barang dan jasa dengan masukan (*input*) yang langka di dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)¹⁰³. Selain itu menurut mulyadi (2007) mengemukakan bahwa : “efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio *input* dan *output* biaya dan keuntungan¹⁰⁴.

B. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Dari hasil analisis kemampuan keuangan daerah diperoleh rata-rata *share* dan *growth* nilai ≥ 1 maka dikatakan *tinggi*. Kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berada pada posisi Kuadran I, yaitu menunjukkan bahwa pada kuadran ini kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berada pada kondisi ideal, daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan (*share*) PAD terhadap APBD tinggi dengan pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

¹⁰³ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2003) Hal, 178

¹⁰⁴ Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal, 63

Dengan demikian kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur sudah dapat menerapkan otonomi daerah dengan baik seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002), Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat¹⁰⁵. selain itu menurut Bappenas (2003), Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki¹⁰⁶.

C. Analisis Variabel Penelitian

1. Hubungan kinerja keuangan dan kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017.

Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau

¹⁰⁵ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: 2002), Hal. 68

¹⁰⁶ Bappenas, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, (Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah), hal 1

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Menurut Erlina (2008), Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas. suatu proses, atau suatu organisasi. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya

sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya¹⁰⁷.

Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangannya secara optimal, melalui indikator kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi yang baik. Pemerintah daerah yang menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013)¹⁰⁸, yang menggunakan analisis rasio terhadap APBD, menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus membaik, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian

¹⁰⁷ Mariana, L., *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah pemekaran daerah (studi empiris pada kabupaten/kota di Sumatera Barat)*, (pp : juni 2013), Hal 1-16

¹⁰⁸ Agustina, *analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah.....*

daerah meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negative seperti rasio aktivitas dan pertumbuhan.

2. Hubungan kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat

Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017. Pemerintah daerah kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur belum mampu untuk mengelola potensi daerahnya dengan baik, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi. Terbukti dari 12 kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur hanya 3 daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah berada posisi *sangat baik*.

Menurut Widodo (2001)¹⁰⁹, rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman.

Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian

¹⁰⁹ Widodo, Joko. *Good Governance: telaah dari dimensi: akuntabilitas dan control birokrasi pada era desentralisasi dan tonomi daerah*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2001), Hal 150

fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total APBD mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mendukung pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menuangkan kebijakan publiknya di daerah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan untuk belanja pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakkonsistenan peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus mengindikasikan bahwa pendapatan daerah yang dimiliki pemerintah

Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus belum optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum menjadi tugas pokok pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai ketika pemerintah daerah telah memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan dana yang memang ditunjuk untuk hal tersebut. Otonomi daerah sendiri tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait tentang pembangunan saja, akan tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian pendapatan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah, juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, termasuk dana yang akan digunakan dalam aktivitas pendanaan layanan publik bagi masyarakat. hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu.

Amalia dan Purbadharmaja (2014) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi dan Sutrisna (2014) juga mengemukakan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Azwar, dkk (2014) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat masyarakat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan¹¹⁰.

Studi yang dilakukan oleh Suci (2013) terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengemukakan bahwa kemandirian fiskal mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Penelitian tersebut membuktikan peningkatan kemandirian fiskal sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundang-undangan terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur belum bisa menjadikan PAD menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat harusnya hanya sebagai sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan.

Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Kemandirian akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Aspek lainnya yang juga

¹¹⁰ Azwar, & Subekan, A, *Kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan rakyat di era desentralisasi fiskal (studi empiris pada kabupaten/kota provinsi Sulawesi selatan ta 2008-2012*, (Info Artha STAN, 2014), hal 5-6

menjadi penting adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai sumber penggerak roda pembangunan.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi mereka berupa kehidupan sosialnya¹¹¹. Sedangkan definisi kesejahteraan menurut Ahmad Zaki Badawi yakni :

الرفاهية: الحالة التي تتحقق فيها الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع من
غذاء وتعليم وصحة وتأمين ضدكوارث الحياة

“Kesejahteraan (Welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan”¹¹²

Menurut Jaih Mubyanto menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenang tidak kurang dalam batas yang mungkin dicapai oleh perorangan. Dimana dijelaskan juga bahwa kriteria orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah : (1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, (2) terpelihara kesehatannya, (3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak, selain itu kesejahteraan mencakup unsur batin yakni perasaan untuk ingin diperlakukan secara adil dalam hidup¹¹³.

3. Hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

¹¹² Dr. Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah*, (Beirut, Maktabah Lubnan : New Impression, 1982), 445

¹¹³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), 22-23

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017.

Dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas, dan sumber-sumber yang berkaitan (seperti: keuangan, karyawan, dll) dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah¹¹⁴.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, maka dengan adanya penyerahan wewenang tersebut dibentuk dan disusunlah pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonom. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai salah satu tujuan bernegara khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih

¹¹⁴ Akhmad mulyana, *Sosiologi Komunikasi*, (pusat pengembangan bahan ajar UMB, 2006), hal 26

demokratis. Pemanfaatan anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dapat digunakan untuk mendukung fungsi pelayanan publik sesuai dengan amanah yang dilimpahkan guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah mampu melakukan penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah, dapat mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah, selain itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, memberikan pelayanan publik disetiap daerah sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bisma dan Susanto (2010), desentralisasi fiskal provinsi NTB masuk kategori cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi¹¹⁵.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah daerah kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta Susila Plus Provinsi Jawa Timur dalam memaknai konsep desentralisasi fiskal, yaitu bahwa inti dari desentralisasi adalah kemandirian daerah, masih harus ditingkatkan. Ketergantungan yang fluktuatif terhadap bantuan pusat dapat dimaklumi, namun perubahan ke arah kemandirian harus terus dilakukan agar desentralisasi dapat mencapai tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan masyarakat. dimana dari penelitian ini terbukti

¹¹⁵ Bisma, I.G., & Susanto, H., *Evaluasi Kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi*

bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam penjelasan lebih lanjut, kesejahteraan dalam pandangan Islam berarti adalah seseorang yang merasa aman, sentosa dan damai. Dimana hal ini sejalan dengan misi Rasulullah Saw yang dinyatakan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” .

Menurut Umer Chapra dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah merealisasikan tujuan manusia untuk dapat mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat (falah) serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah)¹¹⁶.

4. Hubungan Efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat

Efektivitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017. Seperti yang disampaikan oleh Halim (2011), efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan¹¹⁷. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan

¹¹⁶ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7

¹¹⁷ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hal 255

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen Suyana Utama, (2008).

Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi dapat melaksanakan tugas penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diterima dikelola dengan baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bergantung pada nominal pendapatannya, namun juga tata cara pengelolaannya. Semakin tingginya PAD suatu daerah dapat menjamin memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terbukti yang terjadi kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dari hasil perhitungan rasio efektivitas dari 12 kabupaten dan kota ada delapan daerah tergolong *sangat efektif*, dua daerah masuk kategori *efektif* dan dua daerah masuk kategori *cukup efektif*. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa pertumbuhan PAD mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yakni pembiayaan banyak untuk membiayai belanja modal. Belanja modal merupakan jenis belanja yang menghasilkan nilai tambah aset baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan pada periode tertentu.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah daerah yang mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki

sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik. Sehingga dengan layanan publik yang baik akan tercapai kesejahteraan yang tinggi. Penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Azwar, dkk (2014), efektivitas kinerja keuangan provinsi sulawesi selatan TA 2008-2012 memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat¹¹⁸.

Tahapan kesejahteraan dijelaskan oleh Mukhlisin Muzarie yang mengadopsi teori milik Abraham Maslow menyebutkan kesejahteraan sosial diperoleh secara dimana tahap pertama adalah terpenuhi kebutuhan fisik atau kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, diikuti oleh kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan, dan tahap terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dan hal ini ditempuh secara bertahap dan berurutan¹¹⁹.

5. Hubungan Efisiensi terhadap kesejahteraan masyarakat

Efisiensi memiliki hubungan tidak positif namun signifikan dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017. Dijelaskan oleh Mahmudi¹²⁰, efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Menurut mulyadi (2007) mengemukakan bahwa : “efisiensi adalah

¹¹⁸ Azwar, & Subekan, A, *Kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan.....*

¹¹⁹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 311

¹²⁰ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal 171

ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio *input* dan *output* biaya dan keuntungan¹²¹. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001) menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatgunaan, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Mahmudi (2011), yang mengatakan efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah¹²².

Semakin efisien pendapatan yang digunakan untuk membiayai hal produktif maka akan menghasilkan output yang besar pula. Seperti halnya pembiayaan untuk belanja modal yang besar akan mendorong terjadinya

¹²¹ Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal, 63

¹²² Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal 171

pembangunan diberbagai sektor guna mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwar, dkk (2014), yang menjelaskan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial¹²³. Adapun pengaruh signifikan pada penelitian ini disebabkan karena optimalnya perolehan pendapatan dari sumber-sumber di luar retribusi dan pajak daerah yang memang sudah relatif baik (bersifat reguler dan lebih massif), seperti : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain, bagian laba, deviden. Sedangkan untuk sumber PAD lainnya yang sah dapat berupa : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga dan lain-lain.

¹²³ Azwar, & Subekan, A, *kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan.....*

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya system ekonomi apapun termasuk ekonomi islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (the three fundamental and independent economic problem). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan siapa distribusinya.¹²⁴

Sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal diseluruh sector produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal.

¹²⁴ Abdur Rohman, *ekonomi Al-Ghazali, menelusuri konsep ekonomi islam dalam ihya' ulum al-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), Hal 84-86

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat tiga pertanyaan yang menjadi latar belakang penelitian ini, pertama Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur selama enam tahun terakhir (Tahun Anggaran 2012-2017) dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, kedua, Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 diukur melalui *share* dan *growth* APBD, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan ketiga, Apakah Rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur. Permasalahan mendasar dari penelitian ini adalah apakah kinerja keuangan mendorong kesejahteraan masyarakat. berdasarkan analisa dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tingkat kemandirian keuangan Kota/Kabupaten SWP Gerbangkertasusila plus di Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur mayoritas masih bergantung oleh dana dari pemerintah pusat

melalui dana perimbangan. Terbukti dari 12 kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur hanya 3 daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah berada posisi *sangat baik*. Rasio desentralisasi fiskal kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 terlihat bahwa Kt. Surabaya yang hanya berada pada kategori *sangat baik* dengan rata-rata rasio desentralisasi fiskal diatas 50. Sedangkan ke sebelas kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur belum bisa melaksanakan fungsi atau tugas pemerintahan secara efektif anggaran yang diberikan dari pusat. Rasio efektivitas kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 bahwa Kab. Gresik dan Kt. Surabaya berada pada kategori *cukup efektif*. Kab. Mojokerto, dan Kab. Sidoarjo berada pada kategori *efektif*. Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kt. Mojokerto dan Kt Pasuruan berada pada *sangat efektif*. Rasio efisiensi kabupaten dan kota Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 menunjukkan, bahwa Kt. Mojokerto dan Kt. Pasuruan berada pada kategori *cukup efisien*. Sedangkan Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban dan Kt. Surabaya berada pada kategori *efisien*.

- b. Dari hasil analisis kemampuan keuangan daerah diperoleh rata-rata *share* dan *growth* nilai ≥ 1 maka dikatakan *tinggi*. Kemudian dengan pemetaan

kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berada pada posisi Kuadran I, yaitu menunjukkan bahwa pada kuadran ini kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur berada pada kondisi ideal.

- c. Kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh tidak positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Efektivitas keuangan daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Efisiensi memiliki hubungan tidak positif namun signifikan dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota SWP Gerbangkerta susila Plus Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017.

B. Saran

Menimbang kesimpulan yang telah diambil, beberapa saran dapat diberikan diantaranya adalah :

1. Pemerintah daerah harus fokus terhadap potensi yang dimiliki daerah dan atau mengembangkan potensi daerah yang sudah ada. Dengan adanya pemerintah daerah yang lebih fokus untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerahnya maka hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
2. Selain itu sebaiknya pemerintah daerah mempertahankan belanja daerah untuk belanja modal dan operasional karena hal ini akan membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, sehingga dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada, maka hal ini akan mampu untuk meningkatkan investasi yang ada di wilayah ini.
3. Pemerintah daerah harus mempertahankan bantuan pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah harus memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk kedua bidang ini.
4. Sebaiknya pemerintah daerah juga harus memperhatikan sektor primer yang kalah bersaing dengan sektor-sektor sekunder ataupun sektor tersier. Dengan pemerintah daerah memperhatikan hal ini, maka pemerintah daerah akan memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sektor primer, dan dengan meningkatnya sektor primer maka akan menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, O. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ekonomi* 1-10.
- Aedy, H. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Z. A. (1974). *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Akhmad Mulyana. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB
- Alvionita, W. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros*. *Jurnal Riset Edisi Xvi*, 59-71.
- Azwar, & Subekan, A. (2014). Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012). *Info Artha STAN* , 79-101.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (1988). *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Bappenas. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, (Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah)
- Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Basri, A. F. M., dan Rivai, V. 2005, *performance appraisal*. PT Raja. Grafindo Persada. Jakarta.
- Bisma, I. G., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Ganec Swara*, 75-86.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Halim, A. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2012. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Haekal, M. H. (1989). *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Huda, Nurul, dan Ahmad Muti. 2011. *Keuangan public islam pendekatan AL-Kharaj*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *keuangan public islam pendekatan teori dan sejarah*. Kencana. Jakarta
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta
- Mamuka, Veronika, & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurna EMBA*, 646-655.
- Maryati, Ulfi, & Endrawati. (2010). .Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi:Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol 5, No 2.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mariana. L. (2013, Juni). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sesudah pemekaran daerah (studi empiris pada kabupaten/kota di Sumatera Barat). Pp. 1-16

- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nataluddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN. Yogyakarta
- Nirwana, E., Taufik, T., & Ratnawati, V. (2014). Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. *Sorot*, 1-16.
- Puspitasari, A.F. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ekonomi* 1-22.
- Rohman, A. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Santoso, Imam, & Suparta, I. W. (2015). Flyper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 135-165.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suyana Utama, Made. (2009). *Buku ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Sholahuddin, M. (2009). *World Revolution With Muhammad*. Sidoarjo: Mashun.
- Tama, A. I. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Apbd Kabupaten/Kota Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* . *Jrak*, 20-32.
- Umi, N. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media .
- Wahyudi, & Tarunasari, L. F. (2013). Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daeah. *JIAKES*, 139-150.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan control Birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Insan cendikia Surabaya.

Wikipedia, *Desentralisasi*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi> , diakses pada 01 Agustus 2018, pukul 22.52 WIB

UUD 1945

UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Keungan Daerah*

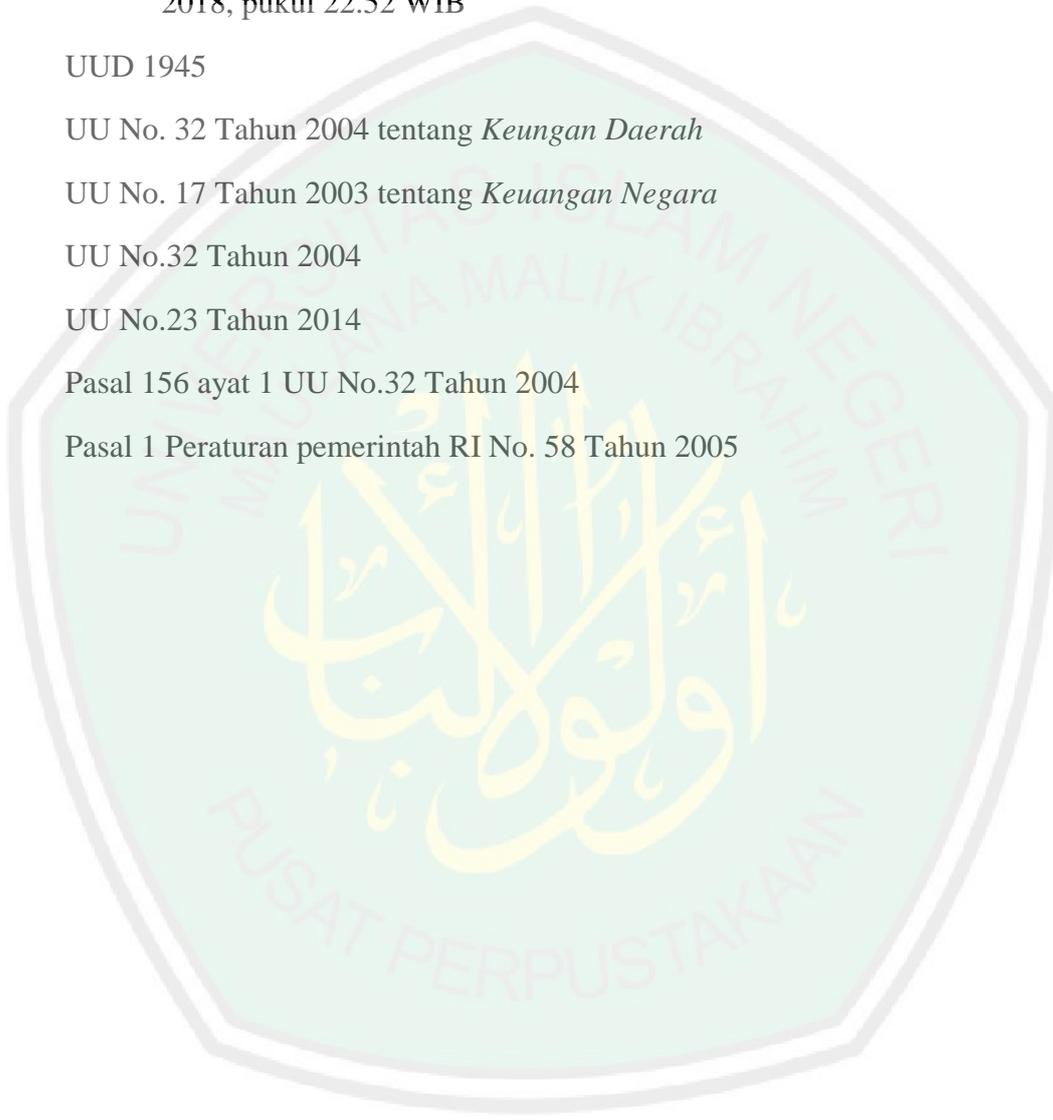
UU No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

UU No.32 Tahun 2004

UU No.23 Tahun 2014

Pasal 156 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004

Pasal 1 Peraturan pemerintah RI No. 58 Tahun 2005



**Lampiran 1 : IPM dan Realisasi PD Kabupaten Dan Kota
Di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus**

Wilayah	IPM								Rata2
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Bangkalan	57.23	58.63	59.65	60.19	60.71	61.49	62.06	62.3	60.28
Kabupaten Bojonegoro	62.19	63.22	64.2	64.85	65.27	66.17	66.73	67.28	64.99
Kabupaten Gresik	69.9	71.11	72.12	72.47	72.84	73.57	74.46	74.84	72.66
Kabupaten Jombang	66.2	66.84	67.82	68.63	69.07	69.59	70.03	70.88	68.63
Kabupaten Lamongan	65.4	66.21	67.51	68.9	69.42	69.84	70.34	71.11	68.59
Kabupaten Mojokerto	68.14	68.71	69.17	69.84	70.22	70.85	71.38	72.36	70.08
Kabupaten Pasuruan	60.79	61.43	62.31	63.74	64.35	65.04	65.71	66.69	63.76
Kabupaten Sidoarjo	73.75	74.48	75.14	76.39	76.78	77.43	78.17	78.7	76.36
Kabupaten Tuban	61.33	62.47	63.36	64.14	64.58	65.52	66.19	66.77	64.30
Kota Mojokerto	72.78	73.47	74.2	74.91	75.04	75.54	76.38	76.77	74.89
Kota Pasuruan	69.69	70.41	72.01	72.89	73.23	73.78	74.11	74.39	72.56
Kota Surabaya	77.2	77.62	78.05	78.51	78.87	79.47	80.38	81.07	78.90

Sumber: BPS Jawa Timur diolah 2018

Kab/Kota	Realisasi PD					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kb. Bangkalan	1049965.65	664132.47	1643100.60	1787701.83	1831913.43	1049965.65
Kb. Bojonegoro	1562514.67	1057176.64	2517680.28	2898769.75	3004084.56	1562514.67
Kb. Gresik	1378508.70	889597.85	2206389.32	2436173.61	2522076.19	1378508.70
Kb. Jombang	1194364.18	774890.52	1905860.37	2151287.88	2257099.36	1194364.18
Kb. Lamongan	1413160.13	838059.79	1969782.92	2436090.96	2719031.21	1413160.13
Kb. Mojokerto	1166148.26	691420.27	1894423.21	2118171.11	2171204.42	1166148.26
Kb. Pasuruan	1489577.67	894550.87	2207797.62	2518560.30	2821450.06	1489577.67
Kb. Sidoarjo	1966493.45	1295190.17	3273379.96	3556219.14	3668041.96	1966493.45
Kb. Tuban	1217450.33	752685.43	1823513.66	2017855.15	2183545.38	1217450.33
Kt. Mojokerto	361174.94	296119.24	689559.35	717544.08	806772.00	361174.94
Kt. Pasuruan	437928.20	289122.01	701582.53	738780.21	789261.03	437928.20
Kt. Surabaya	3413864.32	2534350.53	6052441.12	6619031.16	6827414.52	3413864.32

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Timur diolah 2018

**Lampiran 2 : Target PAD dan Realisasi Belanja Kabupaten Dan Kota
Di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus**

Kab/Kota	Target PAD					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kb. Bangkalan	62836.21	83249.44	101110.82	122079.31	165985.22	191264.29
Kb. Bojonegoro	135696.73	195973.05	196055.50	262951.71	290865.10	329003.73
Kb. Gresik	325314.64	423216.54	636489.16	842196.74	924976.30	949661.51
Kb. Jombang	117508.37	143932.39	205761.16	256125.95	309510.45	344415.88
Kb. Lamongan	108606.01	124605.66	178889.66	266766.89	317130.11	413033.14
Kb. Mojokerto	107073.75	190236.22	302841.16	400009.30	413772.41	436206.71
Kb. Pasuruan	152010.25	198792.76	296721.49	372454.14	452457.06	498908.32
Kb. Sidoarjo	597756.02	721794.68	919706.12	1090575.71	1203782.70	1310069.24
Kb. Tuban	119899.65	185414.62	205170.25	260939.26	300384.94	327384.25
Kt. Mojokerto	48055.97	60806.13	73240.51	92842.14	122036.53	163307.27
Kt. Pasuruan	33207.16	51343.07	69230.25	92731.22	110875.64	129627.45
Kt. Surabaya	2353324.92	2570793.94	2953980.93	3520137.34	3839158.39	4212569.18

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Timur diolah 2018

Kab/Kota	Realisasi Belanja					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kb. Bangkalan	1220089.51	412714.11	156361.38	1838357.54	1944897.68	605364.39
Kb. Bojonegoro	1693112.38	524483.91	241510.09	2844471.92	3244665.91	1076023.17
Kb. Gresik	1451130.80	504289.45	217218.55	2529213.28	2552245.21	895308.26
Kb. Jombang	1363382.39	558894.61	170637.09	2164953.03	2364581.57	806972.78
Kb. Lamongan	1473747.39	483761.72	191117.93	2407389.25	2796049.24	1008691.02
Kb. Mojokerto	1253042.81	388669.88	169818.71	2179606.83	2259797.94	786024.61
Kb. Pasuruan	1563955.54	563050.44	194742.85	2443728.06	3159908.26	1064608.07
Kb. Sidoarjo	2238524.28	768847.99	285341.91	3662799.27	3651619.25	1286162.01
Kb. Tuban	1379033.04	443362.97	168907.00	1998111.56	2219079.05	814146.49
Kt. Mojokerto	488945.51	167673.32	63197.94	706783.75	944717.14	272145.33
Kt. Pasuruan	487917.64	181939.14	637201.52	740796.89	785408.10	253531.01
Kt. Surabaya	4299150.22	1451773.39	570737.85	6490359.76	7153948.69	2621236.40

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Timur diolah 2018

**Lampiran 3 : Realisasi PAD dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten
Dan Kota Di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus**

Kab/Kota	Realisasi PAD					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kb. Bangkalan	80268.57	39640.96	135785.49	175624.05	200073.20	99361.41
Kb. Bojonegoro	159247.62	95274.62	291244.90	337695.83	340407.68	181901.71
Kb. Gresik	427580.87	231736.30	700587.79	799884.87	715480.94	345457.19
Kb. Jombang	164389.35	85255.01	304065.30	363963.25	374141.19	193946.50
Kb. Lamongan	129284.73	72333.78	272409.29	321667.13	403474.46	247185.00
Kb. Mojokerto	164773.75	78775.98	357924.99	414965.87	447620.85	219157.31
Kb. Pasuruan	194858.68	120015.72	421442.63	478269.06	480758.72	264647.46
Kb. Sidoarjo	669617.56	386615.19	1115332.94	1266786.73	1335283.96	675460.55
Kb. Tuban	192499.44	103636.39	291079.94	345965.62	364133.30	198738.99
Kt. Mojokerto	53439.86	34665.54	105277.49	129258.13	152462.20	79640.99
Kt. Pasuruan	42366.22	28822.61	100647.03	114734.24	147818.82	76391.94
Kt. Surabaya	2279613.85	1305046.77	3307323.86	4035649.48	4090206.77	1961489.93

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Timur diolah 2018

Kab/Kota	Dana Perimbangan					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kb. Bangkalan	891828.19	543993.74	1372537.37	1184662.82	1354664.11	747387.68
Kb. Bojonegoro	1438583.30	857003.33	2135850.93	1958214.47	1994205.63	1050253.83
Kb. Gresik	947619.65	570426.28	1484521.47	1103936.34	1336689.00	747262.67
Kb. Jombang	997447.92	592928.28	1543752.12	1170782.68	1479480.11	716668.85
Kb. Lamongan	1006686.72	625032.93	1604396.47	1313958.39	1708680.36	866658.31
Kb. Mojokerto	889242.42	540019.50	1391533.09	1079256.47	1315350.44	724974.70
Kb. Pasuruan	1088171.85	691693.66	1751783.87	1390883.90	1831738.79	965089.68
Kb. Sidoarjo	1201941.01	731443.78	2103999.54	1388639.00	1690087.95	956626.40
Kb. Tuban	946644.49	564412.11	1499334.46	1141173.34	1443895.95	794258.36
Kt. Mojokerto	379471.62	237045.86	580809.02	457456.09	555962.49	245759.56
Kt. Pasuruan	390037.93	236448.07	600935.50	483603.27	575800.44	309196.69
Kt. Surabaya	1433067.69	837727.59	2721487.99	1384772.42	1941019.53	1060341.32

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Timur diolah 2018

**Lampiran 4 : Pertumbuhan PAD Kabupaten Dan Kota
Di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus**

Kab/Kota	Pertumbuhan PAD										
	2012	2013	Pertumbuhan	2014	pertumbuhan	2015	pertumbuhan	2016	pertumbuhan	2017	pertumbuhan
Kb. Bangkalan	80268.57	39640.96	-51%	135785.49	243%	175624.05	29%	200073.20	14%	99361.41	-50%
Kb. Bojonegoro	159247.62	95274.62	-40%	291244.90	206%	337695.83	16%	340407.68	1%	181901.71	-47%
Kb. Gresik	427580.87	231736.30	-46%	700587.79	202%	799884.87	14%	715480.94	-11%	345457.19	-52%
Kb. Jombang	164389.35	85255.01	-48%	304065.30	257%	363963.25	20%	374141.19	3%	193946.50	-48%
Kb. Lamongan	129284.73	72333.78	-44%	272409.29	277%	321667.13	18%	403474.46	25%	247185.00	-39%
Kb. Mojokerto	164773.75	78775.98	-52%	357924.99	354%	414965.87	16%	447620.85	8%	219157.31	-51%
Kb. Pasuruan	194858.68	120015.72	-38%	421442.63	251%	478269.06	13%	480758.72	1%	264647.46	-45%
Kb. Sidoarjo	669617.56	386615.19	-42%	1115332.63	188%	1266786.73	14%	1335283.96	5%	675460.55	-49%
Kb. Tuban	192499.44	103636.39	-46%	291079.94	181%	345965.62	19%	364133.30	5%	198738.99	-45%
Kt. Mojokerto	53439.86	34665.54	-35%	105277.49	204%	129258.13	23%	152462.20	18%	79640.99	-48%
Kt. Pasuruan	42366.22	28822.61	-32%	100647.03	249%	114734.24	14%	147818.82	29%	76391.94	-48%
Kt. Surabaya	2279613.85	1305046.77	-43%	3307323.86	153%	4035649.48	22%	4090206.77	1%	1961489.93	-52%

Sumber: DJPK dan BPS Jawa Timur diolah 2018

**Lampiran 5 : Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dan Kota
Di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus**

Kab/Kota	Pertumbuhan PDRB										
	2012	2013	Pertumbuhan	2014	pertumbuhan	2015	pertumbuhan	2016	pertumbuhan	2017	pertumbuhan
Kb. Bangkalan	17.43	17.28	-1%	18.365	6%	17.717	-4%	17.676	0%	18.147	3%
Kb. Bojonegoro	31.18	31.80	2%	32.404	2%	37.921	17%	46.104	22%	50.693	10%
Kb. Gresik	55.50	58.116	5%	61.482	6%	64.778	5%	67.561	4%	70.705	5%
Kb. Jombang	15.99	16.75	5%	17.654	5%	18.501	5%	19.401	5%	20.347	5%
Kb. Lamongan	15.67	16.73	7%	17.774	6%	18.788	6%	19.882	6%	20.974	5%
Kb. Mojokerto	37.19	39.335	6%	41.375	5%	43.31	5%	45.281	5%	47.47	5%
Kb. Pasuruan	45.45	48.207	6%	51.039	6%	53.367	5%	55.852	5%	58.62	5%
Kb. Sidoarjo	46.38	48.801	5%	51.075	5%	52.904	4%	54.954	4%	57.26	4%
Kb. Tuban	28.04	29.504	5%	30.965	5%	32.315	4%	33.738	4%	35.268	5%
Kt. Mojokerto	27.40	28.81	5%	30.27	5%	31.753	5%	33.401	5%	35.039	5%
Kt. Pasuruan	21.30	22.44	5%	23.597	5%	24.709	5%	25.578	4%	27.082	6%
Kt. Surabaya	94.77	101.368	7%	107.96	7%	113.816	5%	120.058	5%	120.871	1%

Sumber: DJPK dan BPS Jawa Timur diolah 2018